PERAN NU DALAM MODERASI INTERNASIONAL PADA MUKTAMAR INTERNASIONAL FIQIH PERADABAN 2019 – 2023

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rayhan

20323363

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023/2024

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN NU DALAM MODERASI INTERNASIONAL PADA

MUKTAMAR INTERNASIONAL FIQIH PERADABAN 2019 - 2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

3 Desember 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.	
2	Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	
3	Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.	

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 18 Juli 2023



Muhammad Rayhan

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang **1**

1.2 Rumusan Masalah **6**

1.3 Tujuan Penelitian **6**

1.4 Cakupan Penelitian **7**

1.5 Tinjauan Pustaka **8**

1.6 Kerangka Pemikiran **10**

1.7 Argumen Sementara **13**

1.8 Metode Penelitian **15**

1.8.1 Jenis Penelitian 15

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 15

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 15

1.8.4 Proses Penelitian 16

1.9 Sistematika Pembahasan **16**

BAB II **18**

FIQIH SIYASAH ALA NAHDLATUL ULAMA DALAM SOLIDARITAS PERDAMAIAN DUNIA **18**

2.1 Asal Usul Pemikiran Fikih Politik NU: Dari Negara Islam ke Solidaritas Dunia Islam 18

2.2 Transformasi Fiqih Politik NU dari ‘Kembali ke Khittah’ Hingga Reformasi 25

BAB III **41**

MUNCULNYA PERAN NU DALAM MODERASI INTERNASIONAL, PADA MUKTAMAR INTERNASIONAL FIQIH PERADABAN TAHUN 2019 – 2023 ..... **41**

3.1 Sejarah Berdirinya Muktamar Internasional Fiqih Peradaban .. 41

3.2 Peran Nahdlatul Ulama dalam Muktamar Internasional Fiqih Peradaban 43

3.3 Konsep Faith-Based Diplomacy Sebagai Jalur Perdamaian 52

BAB IV **62**

PENUTUP **62**

4.1. Kesimpulan 62

4.2. Saran 63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama satu abad, Nahdhatul Ulama sudah memberi banyak warna yang luar biasa bagi Indonesia dan di skala internasional. NU berkembang dan tumbuh semakin kokoh untuk menjadi suri teladan dalam keber-Islaman yang moderat, menjunjung akhlak mulia dan adat ketimuran, tata krama, unggah-ungguh, etika yang baik, tidak ketinggalan zaman, dan membangun toleransi diantara umat beragama. NU memiliki peran penting dalam berbagai aspek, bahkan organisasi tersebut telah berperan sejak dahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Maka dari itu, NU menjadi salah satu organisasi Islam yang terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia (Suyud et al., 2023).

Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1926 di Jombang, Jawa Timur, oleh para ulama dan santri pesantren sebagai organisasi Islam yang berfokus pada tradisi keagamaan Sunni, dengan bimbingan ideologis dari Ahlus Sunnah wal jamaah (Ahmad Zainul Hamdi, 2020). NU memiliki tujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. NU merupakan organisasi sosial keagamaan yang berperan aktif dalam mendakwahkan konsep Islam Nusantara yang didasarkan pada aspek tekstual dan kontekstual ajaran Islam.

NU memiliki pendekatan keagamaan yang moderat dan inklusif. Mereka memandang Islam sebagai agama yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kasih

sayang, toleransi, dan persatuan. Pada pencapaiannya, NU berhasil berkontribusi dalam membangun peradaban dunia yang mulia dan lebih baik. Proses untuk membangun peradaban dunia tersebut, dibutuhkannya upaya-upaya seperti dialog antar budaya, diplomasi, pendidikan damai, promosi hak asasi manusia, kerja sama internasional, dan sebagainya (Syifa Arrahmah, 2022). Dari sini masyarakat dan NU dapat membangun peradaban yang didasarkan pada perdamaian dunia. Adapun salah satu konferensi untuk membuka wacana peradaban bagi umat manusia yang diprakarsai oleh NU yakni, Muktamar Internasional Fiqih Peradaban.

Muktamar Internasional Fiqih Peradaban adalah sebuah konferensi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia, dan merupakan bagian dari upaya NU guna mempromosikan perdamaian di tatanan dunia global. Konferensi ini dilaksanakan pada Februari 2023, di Hotel Shangri-La Surabaya. Konferensi ini melibatkan 100 hingga 300 cendekiawan dari seluruh dunia. Konferensi ini mencerminkan pentingnya pembahasan isu-isu modern yang berkaitan dengan konsep Islam tentang negara modern, hubungan dengan non-Muslim, serta tata politik global. Selain itu, konferensi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dari adanya konflik atas nama agama atau konflik atas identitas, yang memiliki peluang untuk merusak perdamaian dunia (Muhammad Syakir NF, 2022a).

Konflik antar agama dalam sebuah negara dapat menyebabkan terjadinya ketegangan, perselisihan, atau benturan antara komunitas atau individu yang berbeda agama. Biasanya konflik ini timbul dari berbagai faktor seperti perbedaan keyakinan, perbedaan interpretasi agama, persaingan kekuasaan, politik, atau isu sosial dan ekonomi (Sukamto, 2013) . Tentu melalui konflik antar agama yang cukup kompleks

ini, sebuah negara dan masyarakat turut terkena dampak yang merugikan. Termasuk pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, pengusiran, atau diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Seperti halnya pada isu pendirian negara khilafah yang dianggap dapat menyatukan umat Islam sedunia.

Isu pendirian negara khilafah di negara seperti Indonesia, termasuk pada topik yang kompleks dan cukup kontroversial. Khilafah sendiri merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kepemimpinan politik Islam, yang terpusat dibawah otoritas seorang khilafah yang disebut sebagai pemimpin spiritual dan politik umat Islam. Menurut mereka yang mendukung pendirian negara khilafah ini, umat Islam dapat bersatu dibawah satu entitas politik dan mendapatkan pemimpin tunggal yang mewakili kepentingan mereka (Adhayanto, 2011). Tentu hal ini akan mempengaruhi model pemerintahan, struktur kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kebebasan beragama seseorang khususnya masyarakat yang non-muslim.

Mendirikan negara khilafah ditempat negara-negara yang memiliki keragaman agama yang tinggi, memiliki kerangka sekuler, memiliki komposisi etnis dan suku yang beragam, serta negara dengan demokrasi yang kuat, dianggap tidak sesuai menggunakan sistem khilafah. Hal ini berpotensi merusak perdamaian dunia dan melanggar hak asasi manusia bagi pemeluk non-muslim. Adapun alasan mengapa negara khilafah dapat menimbulkan resiko terhadap perdamaian dunia yakni, adanya perbedaan pemahaman dan persaingan, perselisihan dan konflik dengan negara lain, radikalisasi dan ekstremisme, mengabaikan keberagaman agama dan masyarakat, serta mengabaikan hak asasi beragama (Hidayat, 2014).

Mengetahui isu tersebut, pandangan NU yang melihat pandangan lama (tradisi fiqih klasik) terkait cita-cita menyatukan umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru guna mewujudkan kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan cerminan pandangan NU terkait peran dan tujuan Islam dalam masyakarat yang modern. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mengadvokasi Islam yang moderat, inklusif, dan toleran. NU telah menekankan pentingnya menyesuaikan pemahaman agama dengan kondisi zaman, dan kebutuhan masyarakat (Kendi Setiawan, 2023). Dalam kerangka ini, NU telah mengembangkan konsep "Fiqih Peradaban" melalui Muktamar Internasional, yang menekankan pentingnya pemahaman agama yang responsif dan relevan terhadap tuntutan zaman dan keberagaman sosial.

Fiqih Peradaban merupakan pendekatan pemahaman agama yang melihat agama sebagai sumber inspirasi yang dapat memberikan pedoman dalam berinteraksi dengan realitas sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Fiqih peradaban juga mengakui bahwa tantangan dan perubahan zaman membutuhkan pemahaman agama yang responsif, dan mampu memberikan solusi dalam konteks modern. Pendekatan ini berorientasi terhadap pemahaman agama yang sejalan dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi, kesetaraan, dan perdamaian (Ainul Yatimul, 2023).

Melalui Muktamar Internasional yang diadakan oleh NU, konferensi ini dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan konsep Fiqih Peradaban dan membahas isu-isu modern yang berkaitan dengan Islam, keberagaman sosial, dan tuntutan zaman. Melalui dialog, pemikiran kolaboratif, dan pertukaran ide konsep Fiqih Peradaban ini menunjukkan adanya komitmen mereka dalam mempromosikan

pemahaman agama yang harmonis, inklusif, beradaptasi dengan zaman, dan ikut membangun perdamaian dunia. Seperti halnya ketika Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki alasan merekomendasikan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) untuk berpartisipasi dalam forum R20. R20, yang merupakan forum lintas agama yang terintegrasi dengan agenda G20, dirancang untuk mempertemukan para pemimpin agama dari berbagai latar belakang guna membahas isu-isu global, khususnya yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, dan perdamaian. Keputusan untuk melibatkan RSS dalam forum ini didasarkan pada beberapa pertimbangan penting.

RSS dianggap sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar di India, terutama dalam konteks politik dan sosial. Sebagai akar kekuatan dari Partai Bharatiya Janata (BJP), yang saat ini memerintah India, RSS memiliki hubungan erat dengan kebijakan pemerintah India. NU, dalam perannya sebagai penyelenggara R20, berkoordinasi dengan Pemerintah India untuk memastikan bahwa tokoh-tokoh yang diundang mencerminkan rekomendasi resmi dari negara tersebut. Dalam hal ini, rekomendasi untuk mengundang perwakilan dari RSS adalah langkah strategis untuk menghormati keputusan pemerintah India dan menjaga hubungan diplomatik antara kedua negara. NU memandang bahwa melibatkan organisasi dengan pengaruh signifikan seperti RSS dapat memperkuat komunikasi dan kerja sama antar negara di forum internasional untuk mendorong proses perdamaian dengan basis agama.

Berlatar belakang dari hal tersebut, Muktamar Internasional pada Fiqih Peradaban, membutuhkan moderasi internasional untuk mendorong negara-negara dalam menjalankan hubungan yang saling menghormati, menghargai perbedaan, dan

bekerja sama dalam mencapai perdamaian dan keadilan global. Pendekatan ini akan melibatkan dialog, negosiasi, dan kerja sama dalam menyelesaikan konflik, menghindari ekstremisme, dan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dapat dikatakan bahwa konsep Moderasi Internasional, Muktamar Internasional, dan Fiqih Peradaban saling berkaitan dalam upaya membangun kerangka pemahaman, kerja sama, dan perdamaian di tingkat internasional. Moderasi internasional bisa dijadikan landasan bagi Muktamat Internasional untuk membahas isu-isu modern, termasuk melalui perspektif Fiqih Peradaban yang diterapkan oleh NU (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul "Peran NU dalam Moderasi Internasional, pada Muktamar Internasional Fiqih Peradaban Tahun 2019 - 2023".

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran NU dalam moderasi internasional pada Muktamar Internasional Fiqh Peradaban Tahun 2019 - 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan judul "Peran NU dalam Moderasi Internasional, pada Muktamar Internasional Fiqih Peradaban Tahun 2019 - 2023" peneliti bermaksud mengambil tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan NU berperan dalam Moderasi Internasional, pada Muktamar Internasional Fiqih Peradaban

2. Untuk mengetahui konsep khilafah menurut NU, sesuai dengan visi baru dalam mewujudkan kemaslahatan umat

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti peran dari organisasi masyarakat Islam yaitu Nahdlatul Ulama, dalam membangun peradaban dunia melalui konferensi Muktamar Internasional Fiqih Peradaban. NU memiliki peran signifikan dalam melakukan perdamaian dunia dengan cara mengembangkan wacana baru fiqih, yaitu fiqih yang akan dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antar golongan, dan saling mengargai perbedaan (Isdarmadji 2023).

Mengambil tahun 2019 - 2023 disebabkan, perkembangan ide Muktamar Internasional Fiqih Perdaban ini telah mulai ada sejak konferensi besar NU di tahun 2019. Yang mana hingga sekarang ide-ide tersebut menjadi pendorong bagi lahirnya Muktamar Internasional Fiqih Perdaban. Hal ini merupakan contoh konkret dari bagaimana sebuah ide-ide dan inisiatif tertentu dapat membentuk perkembangan lebih lanjut dalam konteks diplomasi dan hubungan antaragama (Muhammad Syakir NF, 2022a).

Diketahui Peran NU dalam Moderasi Internasional, pada Muktamar Internasional Fiqih Peradaban Tahun 2019 - 2023 diantaranya melakukan dialog dan pertemuan, melakukan pertukaran budaya, melakukan kolaborasi dan jaringan, memperkuat kerja sama dengan beberapa aktor lainnya, serta mempromosikan pemahaman agama yang inklusif dan adaptif.

1.5 Tinjauan Pustaka

Adapun tujuan tinjauan pustaka ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti, dan mengidentifikasi celah penelitian untuk bisa dilengkapi. Penelitian ini difokuskan pada "Peran NU dalam Moderasi Internasional, pada Muktamar Internasional Fiqih Peradaban Tahun 2019 - 2023". Melalui tinjauan pustaka ini diharapkan berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk penelitian baru, dan membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait topik yang diteliti. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini yakni:

Penelitian pertama yang didapatkan dari sumber jurnal yang ditulis oleh Muchamad Saiful Muluk, Rika Wahyuni Tambunan, dan Ardiansyah Bagus pada tahun 2023. Jurnal ini membahas peran Nahdhatul Ulama (NU) dalam merespon segala perubahan sosial yang terjadi, guna mewujudkan perdamaian di dunia, serta implementasinya terhadap *spirit* trilogi ukhuwah yang digagas oleh KH. Ahmad Shiddiq dalam berkehidupan digital. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya tekad dan komitmen yang cukup kuat dari NU, untuk menjaga perdamaian dunia melalui para tokoh ulamanya (Muluk et al., 2023).

Penelitian kedua diperoleh dari sumber jurnal yang diteliti oleh Robingun Suyud El Syam, M. Yusuf Amin Nugroho, Siti Lailiyah, dan Muhammad Saefullah pada tahun 2023. Jurnal ini lebih banyak membahas dialektika capaian dan tantangan selama satu abad Nahdhatul Ulama. Menurut hasil penelitiannya, NU dalam satu abad memperoleh lima pencapaian yakni: pertama, sebagai organisasi pelestari tradisi, yang mana NU berhasil mempertahankan diri sebagai organisasi dengan pengikut terbanyak

di Indonesia bahkan di dunia. Kedua, berhasil memainkan peran pada percaturan politik Indonesia (dari pra-kemerdekaan hingga saat ini). Ketiga, pada konteks pendidikan, NU berhasil mengintegrasiikan sistem pendidikan modern dengan cara tetap mempertahankan identitas pesantren. Keempat, pada konteks budaya, selalu menjadi garda terdepan sebagai aktor pelestari kebudayaan berbasisi lokal (media dakwah). Kelima, berperan menjadi penyokong utama pada agenda pemerintah, seperti isu radikalisme beragama di Indonesia (Suyud et al., 2023).

Penelitian ketiga diperoleh dari sumber jurnal yang diteliti oleh A. Jauhar Fuad pada tahun 2020. Jurnal ini membahas sejarah moderasi Islam dalam organisasi Nahdhatul Ulama. Yang mana menurut hasil penelitian mereka, perkembangan internasional telah mengarah pada pembentukan NU, sedangkan keadaan sosial-keagamaan dan politik negara ini hanya bagian dari alasan untuk bisa mendirikan organisasi tersebut (Fuad, 2020) .

Kemudian terdapat beberapa titik persamaan dan perbedaan dari penelitian yang telah peneliti teliti. Untuk persamaannya ketiga jurnal diatas sama-sama membahas peran Nahdhatul Ulama yang memiliki dampak besar bagi masyarakat Indonesia dan internasional. Baik itu pada aspek pendidikan, politik, maupun perdamaian dunia.

Disamping itu terdapat perbedaan yang terletak pada objek penelitiannya. Pada jurnal pertama, konteks penelitiannya pada penggunaan trilogi ukhuwah melalui konstruksi konsep spirit perdamaian dunia pada era digital. Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Pada jurnal kedua, lebih merefleksikan pencapaian dan kendala dari

Nahdhatul selama satu abad ini. Penelitian tersebut juga menggunakan deskriptif kualitatif untuk memahami variabel mandiri. Pada jurnal ketiga, lebih membahas sejarah moderasi Islam yang dilakukan oleh NU, mulai dari bagaimana \pembentukan NU dalam melindungi kepentingan muslim tradisionalis, hingga pada memasuki era globalisasi.

Sedangkan berdasarkan ketiga tinjauan pustaka tersebut, peneliti ingin menyelidiki lebih dalam terkait peran NU dalam Moderasi Internasional di Tahun 2019 - 2023, khususnya pada Muktamar Internaisonal Fiqih Peradaban, menggunakan perspektif *Faith Based Diplomacy.*

1.6 Kerangka Pemikiran

Diplomasi adalah sebuah seni komunikasi yang digunakan oleh antar negara untuk mempertimbangkan sebuah Kerjasama yang dijalin dengan negara yang lain. Secara struktur, karateristik utama dalam diplomasi berfungsi ketika kekuasaan dalam negara sedang bekerja dan ketika pihak-pihak yang berkaitan cenderung ingin menggunakan metode kekerasan.

Menurut Michael Sheehan dalam bukunya yang berjudul ‘The Balance of Power: History and Theory’ yang dikutip oleh Jodok Troy mengatakan jika teori diplomasi satu akar dengan budaya realisme. Namun, kecendrungan kaum realisme tidak pernah meng-glorifikasi sebuah kekuasaan, yang mana mereka mempunyai sikap skeptis terhadap hal tersebut. Secara garis besar pandangan realisme tidak bisa ditempatkan pada posisi yang sama dengan pandangan *realpolitik*. Dengan begitu pemahaman prinsip keseimbangan kekuasaan seperti yang dikatakan oleh realisme

klasik harus dipahami sebagai prinsip etika politik. Karena prinsip moral pada dasarnya tidak bisa sepenunya terpenuhi, maka seseorang dapat meletakkan sebuah moral dan etika dalam suatu bentuk yang seimbang, diplomasi yang berbasis secara agama atau *Faith Based Diplomacy* dapat memenuhi kebutuhan ini dan peka terhadap sebuah perbedaan-perbedaan dari pihak yang bertikai (Troy, 2008).

Teori *Faith Based Diplomacy* atau diplomasi berbasis keyakinan merupakan pendekatan dalam diplomasi internasional yang mengintegrasikan faktor-faktor keagamaan, moral, dan etika guna mencapai perdamaian, kerja sama, dan pemahaman antara negara-negara atau kelompok-kelompok yang berbeda. Teori ini tidak memiliki suatu individu atau tokoh yang mengidentifikasikannya sebagai pendiri. Istilah ini kerap sekali diperkenalkan secara resmi dan digunakan mulai pada abad ke-20.

Faith Based Diplomacy memiliki karakteristik guna memberikan pemimpin dan institusi agama pengaruh yang kuat pada proses *peacemaking,* yang mana tidak dimiliki oleh aktor diplomasi sekuler. Teori ini bekerja dengan mengintegrasikan faktor keagamaan, moral, dan etika kedalam prinsip-prinsip diplomasi tradisional. Melalui *Faith Based Diplomacy*, teori ini dapat melakukan mediasi dan dialog antaragama, membangun kerja sama lintas budaya, mendorong isu kemanusiaan, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran dalam mempromosikan toleransi. *Faith Based Diplomacy* lebih menekankan gagasan alternatif dalam menyelesaikan masalah melalui pesan damai, dan bukan melalui provokasi.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Jodok Troy yang berjudul ‘Faith-Based Diplomacy Under Examination’ mengatakan jika Joseph Monthville membuat dua metode pendekatan dari praktik diplomasi. Pertama yaitu metode *satu* yang dilakukan

secara resmi atau dilakukan oleh pemerintah, dan metode yang *kedua* dilakukan secara tidak resmi atau nonpemerintah (Troy, 2008). Walaupun masih menjadi sebuah pertanyaan apakah *faith-based diplomacy* termasuk dalam metode jalur yang kedua, banyak literatur dan juga diakui secara luas bahwa diplomasi berbasis agama termasuk dalam jenis diplomasi ini.

Cara kerja diplomasi metode kedua mempunyai dua cara, yang pertama adalah melibatkan kelompok-kelompok kecil untuk membuat sebuah ruang diskursus pemecahan permasalahan untuk para pemimpin dunia, lalu yang kedua adalah membentuk Upaya untuk mempengaruhi opini publik. Dari ruang-ruang diskursus tersebut dapat membangun hubungan pribadi yang dapat secara langsung diterapkan di dalam sebuah lingkungan yang didesain untuk memahami konflik dari kedua sudut yang sedang bertikai dan mencoba untuk mengembangkan strategi dalam menghadapi konflik bersama. Tujuan utamanya adalah penyelesaian konflik tanpa senjata, dan resolusi setelah perang.

Douglas Johnston dan Brian Cox mengatakan pada jurnalnya yang berjudul 'Faith-Based Diplomacy and Preventive Engagement' jika diplomasi basis agama secara konseptual masih terbilang baru pada kajian hubungan internasional, namun diplomasi jalur dua ini dapat mengintegrasikan dinamika keyakinan agama dengan sebuah pelaksanaan perdamaian dunia, dengan begitu dapat dikategorikan sebagai rekonsiliasi daripada resuliso konflik. Adapun rekonsiliasi tersebut mempunyai kebutuhan untuk mencari; 1) adanya persatuan dalam keragaman yang mana prosesnya harus secara aktif menerima sebuah pluralisme secara natural, seperti penerimaan secara ras, gender, etnis, dan budaya; 2) penyelesaian harus melibatkan semua pihak,

dan termasuk musuh dari pihak yang terlibat konflik; 3) penyelesaian konflik harus secara damai antar individua tau kelompok; 3) harus mempunyai prasyarat sebuah keefektivitasan dalam pemulihan pasca konflik, atau menjalin hubungan yang sehat; 4) keadilan sebagai pondasi untuk memulai tatanan hubungan antar pihak yang berkonflik (Troy, 2008, pp. 216–217).

Selain itu, ada empat hal faktor diplomasi basis agama dapat diterapkan, Jodok Troy dalam jurnalnya menyebutkan: *pertama,* pada konflik tersebut, agama harus merupakan faktor penting dalam identitas salah satu atau kedua kelompok yang berkonflik. *Kedua,* pada situasi konflik tersebut, pemimpin agama harus dapat dimobilisasi untuk menjadi fasilitator terjadinya perdamaian. *Ketiga,* pada situasi yang mana dua aliran agama terbesar terlibat dalam konflik yang melintasi batas-batas negara. *Keempat,* keterwakilan pihak ketiga dalam mediasi tidak boleh menyertakan unsur agama tertentu (Troy, 2008, p. 218).

Dalam jurnalnya, Jodok Troy menggambarkan ada beberapa nilai agama yang relevan untuk resolusi konflik, seperti empati, komitmen pada non-kekerasan, penghormatan terhadap kehidupan, introspeksi, dan kasih sayang. Pada penjelasannya ia menyoroti dua ciri khas dan konsep yang saling terkait dalam diplomasi berbasis agama yaitu pengampunan dan rekonsiliasi. Konsep-konsep tersebut mendapatkan perhatian dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Dives in Misericordia (yang berarti "kaya akan belas kasihan" dalam bahasa Latin) pada tahun 1980 (Troy, 2008).

Teknik-teknik ini sering diterapkan dalam kegiatan diplomasi berbasis agama sehari-hari dan oleh para diplomat, serta saling berkaitan karena telah digunakan jauh sebelum istilah "diplomasi berbasis agama" dikenal. Pendekatan umum untuk langkah

awal dalam diplomasi jalur dua adalah dengan menyelenggarakan kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah di antara para pemimpin. Selain itu Jodok juga mengatakan bahwa praktik-praktik keagamaan seperti *sembahyang* (berdoa dan bepuasa) dalam kelompok kecil ini membantu para pemimpin untuk mengenali orientasi mereka bersama menuju keadilan sejati, yaitu Tuhan YME.

2.1 Argumen Sementara

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia telah banyak melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan pemahaman agama yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap tuntutan zaman. NU telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk melalui Muktamar Internasional Fiqih Peradaban.

NU sebagai pemimpin dalam muktamar tersebut berperan dalam mengarahkan dan mengorganisir acara tersebut. Kemudian memastikan adanya platform yang memungkinkan untuk melakukan dialog dan pertemuan antar para peserta. Pada dialog dan pertemuan ini, NU memfasilitasi diskusi untuk saling menghormati dan membangun pemahaman bersama, dengan tujuan mencapai kesepahaman yang lebih baik dalam pemahaman agama yang adaptif.

NU juga mendorong pertukaran budaya pada muktamar tersebut, dan turut aktif dalam membangun kolaborasi dan jaringan dengan peserta dan pemangku kepentingan lainnya. Dan terakhir melalui teori *Faith Based Diplomacy*, NU turut melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga dan aktor lainnya untuk meredakan ketegangan konflik.

1.7 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, guna meneliti sebuah kasus atau objek alamiah. Melalui penelitian kualitatif ini juga, nantinya dapat menemukan sebuah proses dari peristiwa. Penelitian kualitatif tersebut mengutamakan penggunaan logika induktif, dengan kategorisasi yang telah diciptakan dari penemuan penelitian dengan informasi yang ada di lapangan, dan data-data yang ditemukan (Rusliwa Somantri, 2005).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam membangun kerangka pemahaman, kerja sama, dan perdamaian di tingkat internasional. Untuk objek penelitiannya berupa Muktamar Internasional Fiqih Peradaban, yang mana konferensi tersebut membahas konsep fiqih peradaban dan upaya untuk menghadapi isu-isu modern yang berkaitan dengan Islam dan tuntutan zaman.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data primer dan sekunder dengan cara melakukan wawancara serta menelusuri berbagai macam dokumen tertulis seperti: Jurnal, Buku, Artikel resmi, *E-book* dan beberapa situs resmi di internet. Hal ini bertujuan guna menghasilkan pemahaman yang lebih akurat terkait topik yang akan diteliti.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan data terkait topik yang dibahas, teknik yang digunakan sama seperti yang penulis jelaskan diatas. Dan nantinya akan dianalisis melalui beberapa tahapan menggunakan teori *Faith Based Diplomacy.* Setelah itu barulah pada tahapan selanjutnya yakni pengumpulan hasil pemikiran dari temuan dan deskripsi yang terkait, sekaligus membuat sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

1.8 Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematikan menjadi 4 bab yang berkaitan satu sama lain, diantaranya:

Bab 1 Pendahuluan

Bab 1 penelitian ini akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, hingga sistematika pembahasan.

Bab 2 Fiqih Siyasah Ala Nahdlatul Ulama Dalam Solidaritas Perdamaian Dunia

Bab 2 memfokuskan pembahasannya terkait bagaimana paradigma fiqih siyasah Ala Nahdlatul Ulama

Bab 3 Munculnya Peran NU Dalam Moderasi Internasional, Pada Muktamar Internasional Fiqih Peradaban Tahun 2019-2023

Bab 3 akan menganalisis lebih lanjut terkait konsep fiqih siyasah yang dibawakan NU dalam Muktamar Internasional Fiqih Peradaban dan peran NU di dalamnya

Bab 4 Penutup

Pada bab penutup, penulis akan memuat kesimpulan-kesimpulan sekaligus rekomendasi yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

FIQIH SIYASAH ALA NAHDLATUL ULAMA DALAM SOLIDARITAS PERDAMAIAN DUNIA

2.2 Asal Usul Pemikiran Fikih Politik NU: Dari Negara Islam ke Solidaritas Dunia Islam

Nahdlatul Ulama, sebagai sebuah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, memiliki peran penting dalam membangun, mempertahankan, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak awal pendiriannya hingga sekarang, keberadaan NU telah terbukti signifikan perannya bagi NKRI. Bahkan sebelum NU resmi berdiri, peran Ulama yang kini tergabung dalam NU sudah sangat terasa. NU telah berhasil menjadi sarana dalam penyebaran dan pendidikan Islam di Indonesia secara luas. Setidaknya ada tiga alasan utama di balik pendirian Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926, yaitu motivasi keagamaan, keinginan mempertahankan paham Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, dan semangat nasionalisme (Farih, 2016).

Dalam belakangan ini, munculnya berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia merupakan hasil dari perjalanan sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan tersebut, muncul sosok KH. Hasyim Asy'ari yaitu sebagai tokoh pemersatu bangsa, diakui sebagai salah satu pendiri bangsa Indonesia. Peran dan pemikiran KH. Hasyim Asy'ari sangat penting dan tidak bisa diabaikan, karena beliau hadir dalam sejarah Indonesia untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat. KH. Hasyim Asy'ari tidak hanya mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, tetapi juga berhasil menyatukan berbagai kelompok Islam melalui MIAI, menggabungkan partai-partai Islam dalam Masyumi, dan mengeluarkan fatwa jihad

yang dikenal sebagai resolusi jihad dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pemikiran kebangsaan KH. Hasyim Asy'ari sebenarnya mengarah pada konsep-konsep politik (fiqh Siyasah). Secara umum, pandangan politik KH. Hasyim Asy'ari selaras dengan doktrin politik Sunni yang dikembangkan oleh Al-Mawardi dan Al-Ghazali (Fadli & Sudrajat, 2020). Doktrin ini pada dasarnya sangat akomodatif terhadap penguasa, karena dirumuskan saat dunia politik Islam sedang mengalami kemunduran, yang menyebabkan anggapan bahwa rakyat berada dalam posisi lemah dan harus tunduk kepada penguasa. Sikap ini sejalan dengan pandangan KH. Hasyim Asy'ari dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama lainnya yang menunjukkan sikap akomodatif terhadap penguasa, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim ketika negara mengalami keadaan yang sangat darurat atau kemunduran.

KH Hasyim Asy'ari meyakini bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Pandangan ini menegaskan bahwa membela dan mempertahankan tanah air merupakan kewajiban yang memiliki nilai religius dalam Islam. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia, KH Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa mempertahankan tanah air dari penjajahan adalah bagian dari jihad, yaitu perjuangan di jalan Allah. Pemikiran ini tercermin dalam fatwa jihad yang dikeluarkan oleh beliau pada 22 Oktober 1945, yang menyerukan umat Islam untuk berjuang melawan penjajah sebagai bentuk pembelaan terhadap tanah air dan agama (Fadli & Sudrajat, 2020).

Fatwa jihad ini menjadi salah satu pendorong semangat perlawanan terhadap penjajahan di kalangan umat Islam Indonesia, terutama di Jawa Timur. Pandangan KH Hasyim Asy'ari tentang kebangsaan tidak hanya bersifat defensive (Yusrianto, 2014),

yaitu mempertahankan tanah air dari serangan asing, tetapi juga bersifat konstruktif, yaitu bagaimana membangun negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan persatuan.

Pada pandangan Islam dan keindonesiaan menurut KH Hasyim Asy'ari bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat saling menguatkan. Beliau melihat bahwa Islam di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Islam di Indonesia telah berakulturasi dengan budaya lokal, sehingga menghasilkan bentuk Islam yang moderat, inklusif, dan toleran. Pandangan ini menjadi dasar bagi konsep keindonesiaan yang diusung oleh KH Hasyim Asy'ari, yaitu sebuah identitas nasional yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) serta menghargai keragaman budaya dan tradisi lokal.

Dalam konteks keindonesiaan sendiri KH Hasyim Asy'ari sering dalam pidato-pidatonya mendorong agar umat Islam Indonesia dapat menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang utuh, tanpa harus kehilangan identitas keislamannya. Beliau menekankan pentingnya persatuan nasional dan menghindari segala bentuk perpecahan yang dapat merusak kesatuan bangsa (Sholihuddin & Jazil, 2021). Dalam pandangannya, umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat yang beragam.

Pandangan tersebut juga berkaitan dengan penerimaan KH Hasyim Asy'ari dan para ulama Nahdlatul Ulama lainnya terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Mereka menerima Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan sejalan dengan ajaran Islam. Baginya, Pancasila adalah perwujudan dari nilai-nilai keadilan, kemanusiaan,

persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan yang memang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Pandangan ini menegaskan bahwa umat Islam dapat hidup dalam negara Pancasila tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keislamannya.

Selain penerimaan atas dasar Pancasila, hal kebangsaan dan keindonesiaan juga dapat dilihat dari bagaimana gaya politik *ta'ridh* yang dilakukan oleh NU pada masa transisi pemerintahan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaannya. Hal tersebut terjadi diakibatkan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok DI/TII yang diprakarsai oleh Kartosoewirjo. Sejak awal, para ulama NU menyatakan bahwa gerakan yang dipimpin oleh Kartosoewirjo dengan mendirikan Negara Islam Indonesia merupakan bentuk pemberontakan (bughot) yang harus ditumpas demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengingat Indonesia adalah negara yang beragam (Syarif Hidayat Santoso, 2014).

Gaya politik ta'ridh merupakan salah satu konsep dalam tradisi politik Islam yang memiliki sejarah panjang dan relevansi dalam berbagai konteks politik, termasuk di Indonesia. Ta'ridh berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti "menyiratkan" atau "menyampaikan sesuatu dengan cara tidak langsung." Dalam konteks politik, ta'ridh merujuk pada gaya komunikasi yang bersifat tidak langsung atau penuh sindiran, di mana seorang pemimpin atau politisi menyampaikan kritik, saran, atau pesan penting tanpa mengatakannya secara eksplisit (Nawawi, 2011). Gaya ini sering digunakan dalam situasi di mana keterusterangan dapat menimbulkan risiko atau dianggap tidak sopan.

Dengan adanya peristiwa tersebut, Menteri Agama yang saat itu dipangku oleh KH Masjkur mengadakan konferensi Alim Ulama se-Indonesia yang bertempat di

Cipanas, Cianjur pada tanggal 2-7 Maret 1954 dengan tujuan mengukuhkan kepala negara Republik Indonesia saat itu yaitu Ir. Soekarno sebagai *Waliyul Amri Dharuri Bissyaukah*. Pada siding parlemen yang diadakan pada tanggal 29 Maret 1954, salah satu ulama NU yaitu KH Abdullah Wahab Chasbullah menjelaskan bagaimana padangan secara fiqih terhadap konsep *Waliyul Amri Dharuri Bissyaukah* yang disematkan kepada Ir. Soekarno (Fathoni, 2018).

Dalam rapat tersebut Kyai Wahab dengan pedoman fiqih menjelaskan jika di dunia Islam telah sepakat untuk mengangkat seorang Imam A'dham (seorang Imam yang layak menduduki posisi Imam) sebagai pemimpin tunggalnya. Salah satu syaratnya adalah memiliki ilmu keislaman setingkat Mujtahid yang absolut. Imam sah ini berbeda dengan Imam darurat. Namun, selama 700 tahun terakhir hingga saat ini, belum ada seorang pun yang memiliki ilmu keislaman yang setara dengan Mujtahid Absolut (Fathoni, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan Imam A'dham hampir mustahil dicapai.

Namun, ada alternatif lain jika umat Islam tidak mampu lagi membina seorang Imam A'dham, maka mereka wajib menunjuk seorang Imam "darurat" di masing-masing negara. Imam yang diangkat secara mendesak disebut Imam Dharuri. Kyai Wahab juga menjelaskan bahwa Imam A'dham dan Imam Dharuri dapat dianggap sebagai pemegang kekuasaan negara yang sah yaitu waliyul amri. Bung Karno yang saat itu dipilih oleh para pemimpin negara, meski tidak dipilih semua orang, menurut hukum Islam, tetap dianggap kepala negara, meski tidak memenuhi semua syarat untuk menjadi walijul amri. Karena tidak memenuhi syarat, yakni tidak dipilih oleh ulama yang berwenang (ahlul halli wal Aqdi), melainkan melalui proses lain, maka

kedudukannya termasuk dalam kategori “hadiah”. Kata “bissyaukah” digunakan karena pada saat itu Ir.Soekarno merupakan pemimpin paling berkuasa di Indonesia.

Dengan semangat penanaman nilai kebangsaan yang tinggi, Nahdlatul Ulama tidak hanya menerapkan nilai-nilai itu di lingkup dalam negeri saja, melainkan memperlebar peran-peran tersebut dengan membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara muslim di Asia dan Afrika (Rijal Mumazziq Z, 2017). Pada pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika tidak hanya terbatas pada pelaksanaan konferensi itu sendiri, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang bagi perkembangan diplomasi Indonesia dan hubungan antar negara di Asia dan Afrika. Setelah konferensi, NU terus mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia dan Afrika, terutama dalam upaya bersama untuk melawan kolonialisme dan imperialism (Nurjaman & Sulaeman, 2020).

Meskipun NU bukan merupakan peserta resmi dalam Konferensi Asia-Afrika, pengaruhnya terlihat dalam berbagai keputusan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. Salah satu isu penting yang didorong oleh NU adalah perlunya membangun solidaritas yang kuat di antara negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Isu ini menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi-diskusi selama konferensi, terutama dalam konteks melawan imperialisme dan kolonialisme yang masih menjadi ancaman bagi banyak negara di Asia dan Afrika (Nurjaman & Sulaeman, 2020).

NU juga berperan dalam mempromosikan dialog antaragama dan budaya sebagai salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar negara peserta. Para ulama NU menekankan bahwa perbedaan agama dan budaya tidak seharusnya menjadi penghalang bagi terciptanya kerjasama yang erat di antara negara-negara Asia dan

Afrika. Gagasan ini kemudian tercermin dalam semangat dan hasil-hasil konferensi, di mana para peserta sepakat untuk menjalin kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang, terlepas dari perbedaan agama dan budaya.

Melalui berbagai forum internasional dan kerjasama antar organisasi Islam. Hubungan ini kemudian menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat non-blok dan pro-kemerdekaan. Selain itu, peran NU dalam Konferensi Asia-Afrika juga memperkuat posisinya sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di dunia. NU dikenal sebagai organisasi yang tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang politik dan diplomasi, terutama dalam konteks memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh bangsa (Ajie Najmuddin, 2022).

Selama berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika, NU berperan dalam mempromosikan nilai-nilai persatuan, solidaritas, dan kerjasama di antara negara-negara peserta. Sebagai organisasi yang berbasis pada ajaran Islam, NU memandang bahwa persaudaraan dan persatuan di antara umat manusia adalah bagian dari ajaran agama yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. NU mendorong agar negara-negara Asia dan Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya.

NU juga berperan dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah konferensi. Para ulama dan tokoh NU berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan penting yang diusung oleh Konferensi Asia-Afrika. Melalui ceramah, khutbah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan

lainnya, NU menyebarluaskan pentingnya konferensi ini bagi kemajuan bangsa dan umat.

2.3 Transformasi Fiqih Politik NU dari 'Kembali ke Khittah' Hingga Reformasi

Pasca kemerdekaan Indonesia, NU mengalami berbagai perubahan yang mempengaruhi penerapan Khittah 1926. Terutama pada era Orde Lama dan Orde Baru, NU mulai terlibat dalam politik praktis, baik melalui pembentukan partai politik sendiri (Partai Nahdlatul Ulama) maupun melalui dukungan terhadap partai politik lainnya (Haidar, 1994). Keterlibatan NU dalam politik praktis ini membawa dampak positif dan negatif bagi organisasi. Di satu sisi, NU berhasil memperjuangkan beberapa kepentingan umat Islam dalam ranah politik nasional. Namun, di sisi lain, keterlibatan ini juga menimbulkan konflik internal, serta menurunkan fokus NU dalam pengembangan sosial-keagamaan.

Pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984, NU secara resmi mengumumkan kembali ke Khittah 1926. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi politik dan sosial saat itu, di mana NU merasa perlu untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar yang digariskan oleh para pendiri. Kembali ke Khittah 1926 berarti NU mengembalikan fokus utamanya pada pengembangan ajaran Islam, pendidikan, dan sosial, serta menjauhkan diri dari politik praktis (Widarda & Rachman, 2023).

Kembali ke Khittah 1926 memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks modern. Di tengah dinamika politik dan sosial yang semakin kompleks, NU menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan berperan dalam membimbing umat

Islam Indonesia. Adapun beberapa alasan mengapa putusan Muktamar NU ke- 27 Situbondo menurut Khaerul Hadi dalam jurnalnya yang berjudul *"Kembali ke Khittah 1926 dan Upaya Penyelesaian Masalah-Masalah Nahdlatul 'Ulama Pasca Muktamar ke- 27 Situbondo (1984-1999)"* (Khaerul Hadi, 2018) antara lain:

a) Menjaga Independensi Organisasi:

   Dengan kembalinya ke Khittah 1926, NU dapat menjaga independensinya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik jangka pendek. Independensi ini memungkinkan NU untuk menjadi kekuatan moral yang objektif dalam memberikan pandangan dan bimbingan kepada umat.

b) Fokus pada Pengembangan Sosial-Keagamaan:

   Dengan tidak terlibat dalam politik praktis, NU dapat lebih fokus pada pengembangan pendidikan, sosial, dan ekonomi umat. Hal ini sangat penting mengingat tantangan besar yang dihadapi umat Islam di Indonesia, seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, dan radikalisme.

c) Meningkatkan Peran NU dalam Masyarakat:

   NU dapat meningkatkan perannya dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. NU dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, tanpa harus terlibat dalam politik praktis.

d) Menjaga Persatuan dan Kesatuan Umat:

> Politik praktis sering kali membawa perpecahan di kalangan umat Islam. Dengan menjauhkan diri dari politik praktis, NU dapat berperan sebagai perekat persatuan umat, sehingga dapat mencegah terjadinya perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan politik.

Muktamar ke-27 juga menghasilkan pemilihan pengurus baru untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam pemilihan ini, Kyai Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Terpilihnya Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU bukan hanya sekadar perubahan dalam kepemimpinan organisasi, tetapi juga menandai dimulainya periode transformasi yang signifikan dalam tubuh Nahdlatul Ulama (Sugiarto, 2010). Gus Dur dikenal sebagai seorang pemikir progresif, ulama kharismatik, dan tokoh yang memiliki visi besar untuk NU. Ia membawa semangat pembaruan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Khittah 1926, yang menekankan pada independensi organisasi dari politik praktis dan fokus pada pengembangan sosial-keagamaan.

Di bawah kepemimpinan Gus Dur, NU mengalami revitalisasi dalam berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Secara internal, Gus Dur berupaya memperkuat struktur organisasi dengan menekankan pentingnya kaderisasi yang berkualitas. Ia mendorong munculnya kader-kader muda yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip Aswaja (Ahlussunnah wal Jamaah). Gus Dur juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana utama untuk membangun kapasitas intelektual dan spiritual kader-kader NU. Melalui lembaga-lembaga pendidikan NU, seperti madrasah dan pesantren, ia berusaha

mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan berjiwa sosial tinggi.

Secara eksternal, Gus Dur membawa NU untuk lebih aktif dalam berbagai isu sosial dan kemanusiaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia memperluas jaringan kerja sama NU dengan berbagai organisasi dan lembaga, baik dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan peran NU dalam menyuarakan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan umat. Gus Dur juga memperjuangkan hak-hak minoritas dan kelompok-kelompok marjinal, serta menentang segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Ia percaya bahwa NU harus menjadi organisasi yang inklusif dan terbuka terhadap berbagai golongan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan dalam Khittah 1926 (Rohimat et al., 2019).

Transformasi yang dibawa Gus Dur tidak hanya memperkuat posisi NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, tetapi juga mengukuhkan peran NU sebagai kekuatan moral yang berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui berbagai inisiatifnya, Gus Dur berhasil membawa NU keluar dari bayang-bayang politik praktis yang sempat mengaburkan peran utama organisasi ini. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa NU harus menjadi pelopor dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan umat, tanpa harus terjebak dalam dinamika politik yang sering kali penuh dengan intrik dan kepentingan sesaat.

> *"Nah, pencarian pencarian ini itu sudah lama mulai dari Qitohbihi ya misalnya Rahmatan Lil'alamin Ya kalau Gus Dur itu menyebut sebagai Pribumisasi Islam, anda cari sendiri nanti yah bacaan Gus Dur itu ada istilah Pribumisasi Islam. Jadi ingin melendingkan Islam dalam konsep tata negara*

yang berbasis pada kewarganegaraan itu kemudian ada istilah Rahmatan Lil'alamin itu yang dibawa oleh Hasyim Muzadi Kemudian Pak Said Aqil itu membawa konsep apa ingat tidak? Islam Nusantara. Gus Yahya membawa konsep Fiqih Peradaban. Jadi sebenarnya ini sama, apa kalau Pribumisasi Islam masih mengacu kepada lokal, Rahmatali Alamin akan bawa ke atas, Islam Nusantara juga membawa lokal, nah Fiqih Peradaban ini ingin membawa Islam ke Internasional tapi basisnya tetap pemahaman yang berkembang tadi, sampai ke Islam Nusantara". (Ahmad Suaedy, 2024)

"Gus Yahya melanjutkan tapi memperluas dan memperluas cakupan dan sasaran sasarannya internasional. Bagaimana supaya Islam bisa terlibat di dalam proses dunia, didalamnya itu kan ada legitimasi terhadap keberadaan negara Nation State dan eksistensi PBB dan juga hak asasi manusia jadi ada tiga komponen di dalam Fiqih Peradaban tadi dari sisi fikihnya sendiri topik-topik atau elemen-elemen yang di dalam fikih itu masih bisa dibawa ke sekarang." (Ahmad Suaedy, 2024)

Kepemimpinan Gus Dur juga ditandai dengan upayanya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil dan kelompok yang terpinggirkan. Dalam berbagai kesempatan, Gus Dur selalu menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Ia percaya bahwa NU harus berdiri di garda terdepan dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil, yang sering kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil. Gus Dur berupaya menjadikan NU sebagai organisasi yang tidak hanya

peduli pada urusan keagamaan, tetapi juga peka terhadap isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.

Periode transformasi yang dipimpin Gus Dur juga memberi pengaruh besar pada bagaimana NU berinteraksi dengan negara. Gus Dur menegaskan bahwa NU harus menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan, untuk memastikan bahwa organisasi ini tetap dapat menjalankan fungsi kontrol sosialnya tanpa terpengaruh oleh tekanan politik. Transformasi itu memberikan kesempatan untuk NU sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia dapat mempraktekkan bagaimana pentingnya posisi organisasi umat beragama bersifat penting dalam pembentukan negara, dan tidak bisa dikesampingkan.

Langkah politik Gus Dur sering kali sulit dipahami oleh banyak orang, terutama oleh kalangan awam. Gaya politiknya yang penuh kejutan dan strategi yang zig-zag membuatnya kerap disalahpahami. Namun, di balik setiap langkahnya, Gus Dur memiliki keyakinan yang kuat dan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip fikih yang telah ia resapi dengan mendalam. Keberanian Gus Dur dalam mengambil risiko, meskipun sering kali menimbulkan kontroversi, adalah cerminan dari komitmennya untuk memperjuangkan keadilan dan demokrasi.

Salah satu langkah politik Gus Dur yang cukup mengundang perhatian dan kecemasan dari pemerintah saat itu adalah inisiatifnya dalam membentuk Forum Demokrasi (Fordem). Fordem adalah sebuah gerakan yang dibentuk Gus Dur bersama sejumlah tokoh masyarakat untuk memperjuangkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Melalui Fordem, Gus Dur dan rekan-rekannya menyuarakan

kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi (Munawir Aziz, 2017).

Keberadaan Fordem jelas membuat pemerintah tidak nyaman, karena gerakan ini tidak hanya mengkritisi, tetapi juga mengorganisir perlawanan intelektual terhadap kebijakan otoriter. Bagi Gus Dur, membentuk Fordem adalah langkah penting untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya menjadi wacana kosong, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Suhanda, 2010). Meskipun langkah ini penuh risiko, Gus Dur tetap melakukannya karena keyakinannya yang mendalam bahwa tanpa demokrasi yang sehat, Indonesia tidak akan bisa mencapai kesejahteraan dan keadilan yang diimpikan oleh semua rakyat.

Gus Dur menggunakan prinsip "al-muhafadzah ala al-qadimi as-shalih wal akhdzu bil jadidi al ashlah" (menjaga sesuatu lama yang baik, serta mengambil inovasi baru yang lebih baik) sebagai landasan dalam setiap langkahnya. Prinsip ini mencerminkan pendekatan yang seimbang antara menjaga tradisi yang sudah teruji dan terbukti baik, dengan keterbukaan terhadap inovasi baru yang lebih baik. Melalui prinsip ini, Gus Dur mampu menggabungkan warisan keagamaan dan budaya yang kaya dengan pemikiran-pemikiran progresif yang relevan dengan perkembangan zaman (Rohimat et al., 2019).

> *"Ya Fiqih Siyasah itu masih menggunakan basis ideologi identitas agama itu. Itu Fiqih Siyasah itu misalnya ada Darul Islam. Darul Harroh, Darul Aman dan lain-lain itu adalah fiqih siyasah itu. Nah, formula-formula di dalamnya itu masih bisa dipakai tapi paradigmanya itu harus berubah. Tidak ada lagi*

Darul Islam, Darul Haroh, Darul Aman itu tidak ada lagi. Semua negara adalah sama warga negaranya itu sama agamanya apa pun di bawah negara nation". (Ahmad Suaedy, 2024)

Dalam menerapkan prinsip ini, Gus Dur sering melakukan manuver-manuver politik yang progresif, bahkan terkadang dianggap kontroversial. Langkah-langkahnya tidak jarang mengejutkan banyak pihak karena keberaniannya dalam membawa pembaruan yang belum tentu bisa diterima secara luas. Gus Dur memahami bahwa perubahan adalah bagian dari dinamika kehidupan yang harus dihadapi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ia tidak ragu untuk mengambil langkah yang dianggapnya benar, meskipun harus menghadapi risiko besar, termasuk kritik dan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh inovasi tersebut. Namun, berbeda dengan Gus Dur, banyak kiai dan ulama lainnya cenderung lebih berhati-hati dalam melangkah. Mereka memilih untuk lebih konservatif dan menghindari polemik yang bisa memecah belah umat. Sikap hati-hati ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa perubahan yang terlalu cepat atau drastis bisa mengakibatkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Para kiai sering kali lebih memilih pendekatan yang gradual dan berusaha untuk menjaga harmoni di tengah-tengah umat, menghindari benturan yang bisa terjadi akibat perubahan yang dianggap terlalu radikal (Sugiarto, 2010).

Gus Dur, di sisi lain, meyakini bahwa pembaruan yang didasari oleh prinsip-prinsip keagamaan yang kokoh tidak akan membawa kehancuran, melainkan justru akan memperkuat fondasi umat. Ia berpendapat bahwa menjaga sesuatu yang baik dari masa lalu harus diiringi dengan keberanian untuk mengadopsi hal-hal baru yang lebih

baik. Inovasi bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi harus dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu contoh nyata dari penerapan prinsip ini adalah munculnya Forum Demokrasi (Fordem) tersebut.

Seperti yang penulis katakana di atas, prinsip "al-muhafadzah ala al-qadimi as-shalih wal akhdzu bil jadidi al ashlah" memungkinkan Gus Dur untuk merespons tantangan-tantangan baru dengan cara yang inovatif tanpa meninggalkan nilai-nilai lama yang telah terbukti baik. Ia berhasil menggabungkan kearifan tradisional dengan pemikiran modern yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan baru di era globalisasi. Inilah yang membuat Gus Dur begitu dihormati, bukan hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan ini, Gus Dur menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang statis dan kaku, tetapi agama yang dinamis dan relevan sepanjang zaman. Inovasi dan perubahan, jika dilakukan dengan dasar yang kuat dan tujuan yang jelas, akan membawa manfaat besar bagi umat. Gus Dur meyakini bahwa untuk membawa bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik, diperlukan keberanian untuk melangkah maju, sembari tetap menjaga nilai-nilai yang telah teruji oleh waktu.

Di masa akhir era orde baru pada hari Senin, 11 Mei 1998, para kiai *sepuh* dari berbagai wilayah di Indonesia mengadakan pertemuan khusus di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Pertemuan ini berlangsung di bawah asuhan KH Abdullah Faqih, seorang Kyai Khos yang dihormati dan memiliki pengaruh besar di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) (Muhammad Syakir NF, 2022a). Dalam suasana yang khidmat dan penuh keprihatinan, para kiai *sepuh* berkumpul untuk membicarakan

situasi terkini yang tengah berkembang di Indonesia, yang pada saat itu sedang berada di ambang krisis besar.

Pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa. Para kiai yang hadir merupakan tokoh-tokoh yang tidak hanya dihormati di kalangan pesantren, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu untuk membahas dan mencari jalan keluar dari krisis yang tengah melanda bangsa. Situasi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia pada waktu itu sedang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tuntutan perubahan semakin menguat di berbagai lapisan masyarakat, dan para kiai merasa perlu untuk mengambil langkah yang bijak demi menyelamatkan bangsa dari kehancuran.

Dalam pertemuan tersebut, para kiai sepuh dengan bijaksana dan penuh kehati-hatian membahas berbagai isu penting yang sedang dihadapi bangsa. Mereka menyadari bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan jalan, di mana keputusan yang diambil dalam waktu dekat akan sangat menentukan masa depan negara. Para kiai, dengan pengalaman dan kearifan mereka, memahami betul bahwa situasi yang dihadapi tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa. Dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek politik, tetapi juga aspek moral dan spiritual bangsa. Pada akhirnya, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting bahwa perubahan memang diperlukan, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang damai dan terarah. Para kiai sepuh sepakat untuk mengedepankan pendekatan moral dan spiritual dalam setiap langkah yang diambil. Mereka juga berkomitmen untuk terus mengawal proses perubahan ini, dengan harapan

bahwa Indonesia dapat keluar dari krisis dengan selamat dan menuju masa depan yang lebih baik.

Empat hari setelah pertemuan para kiai di Pondok Pesantren Langitan, tepatnya pada Jumat, 15 Mei 1998, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat itu, KH Abdurrahman Wahid, yang dikenal luas sebagai Gus Dur, didatangi oleh Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Pada waktu itu, Prabowo menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) sejak Maret 1998, sebuah posisi strategis yang memberikan pengaruh besar dalam militer Indonesia. Kunjungan Prabowo ke kediaman Gus Dur bukanlah kunjungan biasa, melainkan terjadi pada waktu yang sangat tidak lazim, yakni pukul 02.00 WIB dinihari.

Kedatangan Prabowo di tengah malam ini menunjukkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi Indonesia saat itu. Negara sedang berada dalam krisis besar, dengan tekanan reformasi yang semakin menguat dari berbagai lapisan masyarakat. Gus Dur sendiri telah lama menjadi suara vokal dalam menyerukan reformasi. Dalam berbagai forum, ia secara terang-terangan berbicara tentang perlunya perubahan dalam pemerintahan dan sistem politik di Indonesia. Baginya, reformasi adalah jalan untuk menyelamatkan bangsa dari krisis yang semakin parah.

Tidak hanya berbicara di forum-forum, Gus Dur juga mengeluarkan siaran pers yang cukup kontroversial pada masa itu. Dalam siaran pers tersebut, ia dengan tegas menyarankan agar Presiden Soeharto, yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade, mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya (Agus Suparno, 2012). Gus Dur tidak meminta Soeharto untuk sepenuhnya melepaskan peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ia menyarankan agar Soeharto mengambil

peran sebagai "pandito," yaitu sosok yang dihormati dan dihargai, namun tanpa memegang jabatan formal dalam pemerintahan. Konsep "pandito" ini, dalam pandangan Gus Dur, adalah cara bagi Soeharto untuk tetap berkontribusi bagi bangsa, tetapi dari posisi yang lebih netral dan bermartabat.

Konteks waktu dan situasi di mana Prabowo mengunjungi Gus Dur sangat penting untuk dipahami. Indonesia saat itu berada di ujung tanduk, dengan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto yang semakin meluas. Demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial terjadi di berbagai kota, menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Dalam situasi tegang seperti ini, pertemuan antara seorang pemimpin militer seperti Prabowo dan seorang tokoh masyarakat seperti Gus Dur di tengah malam memunculkan berbagai spekulasi.

Ada yang menduga bahwa Prabowo datang untuk mengkonsolidasikan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Gus Dur. Ada juga yang berpendapat bahwa kunjungan itu merupakan upaya untuk mencari jalan keluar dari krisis yang semakin memburuk, atau bahkan untuk menegosiasikan masa depan politik Indonesia di tengah situasi yang sangat tidak menentu. Namun, apapun motivasinya, pertemuan ini menunjukkan bahwa Gus Dur berada di pusat perdebatan nasional mengenai reformasi, dan posisinya sebagai pemimpin masyarakat tidak bisa diabaikan oleh siapapun, termasuk militer.

Pada Sabtu, 16 Mei 1998, Nahdlatul Ulama (NU) secara struktural mengikuti jejak para kiai khos dengan menyatakan secara tegas agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Seruan ini datang di tengah krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia, yang semakin

memperburuk situasi sosial di berbagai daerah. NU, sebagai organisasi keagamaan yang berpengaruh, merasa perlu mengambil sikap untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran yang lebih parah. Dalam pernyataannya, NU menyerukan agar Soeharto "lengser keprabon," sebuah istilah yang berarti turun dari tahta kepresidenan, untuk memberikan kesempatan bagi perubahan yang lebih baik dalam pemerintahan. Pernyataan tersebut segera mendapatkan perhatian luas, termasuk dari pihak militer. Juru Bicara ABRI, Brigjen Mokodongan, merespons pernyataan NU dalam sebuah konferensi pers. Ini menunjukkan bahwa sikap yang diambil oleh NU tidak hanya didengar oleh masyarakat, tetapi juga oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan besar dalam struktur pemerintahan. (Hidayati, 2015).

Tak lama setelah pernyataan itu dikeluarkan, sejumlah tokoh NU, bersama dengan tokoh-tokoh dari organisasi lain, mengambil langkah lebih lanjut dengan mendatangi Soeharto secara langsung. Mereka meminta agar Soeharto mundur dari jabatannya demi kebaikan bangsa dan untuk mencegah terjadinya krisis yang lebih mendalam. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kolektif berbagai elemen bangsa untuk mendorong terjadinya transisi kekuasaan secara damai, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia (Muhammad Syakir NF, 2022a). Dengan demikian, pernyataan NU dan tindakan yang diambil oleh para tokoh-tokohnya menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia, menandai dukungan penuh dari organisasi keagamaan terbesar di Indonesia terhadap proses reformasi yang sedang berlangsung. Sikap tegas ini juga mencerminkan tanggung jawab moral NU sebagai penjaga moralitas bangsa, yang selalu berusaha untuk berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan masa depan Indonesia.

Pada suatu wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Ketua PBNU yaitu Ahmad Suaedy menjelaskan bahwa pentingnya proses penyusunan konsep sebelum suatu gagasan dibakukan. Dalam konteks Fiqih Peradaban, konsep yang diajukan bukan untuk segera menjadi aturan baku, tetapi memerlukan eksplorasi dan kajian terlebih dahulu. Ahmad Suaedy menekankan bahwa kritik terhadap fiqih yang telah berjalan selama 14 abad bukanlah hal yang mudah. Fiqih yang selama ini berkembang didasarkan pada identitas agama, sedangkan Fiqih Peradaban bertujuan untuk beralih dari identitas agama menuju kemanusiaan dan kewarganegaraan.

> *"Ya jadi konsep dulu baru dibakukan, kalau dibakukan dulu baru pencarian itu artinya bukan pencarian. Jadi itu demokratisnya itu di situ. Jadi, konsep, landasan historisme dikaji dulu tadi saya bilang kan itu merupakan rangkaian dari sebelumnya kan jadi ini dirumuskan dulu baru nanti di di apa namanya? Dibakukan bukan dari baku dulu karena kritik terhadap fiqih yang sudah berlangsung 14 abad itu tidak mudah, inikan mengkritik eksistensi fiqih yang sudah berjalan 14 abad itu yang tadi ideologi ideologi identitas agama tadi itu itu sudah berjalan 14 abad jadi untuk mengubah ini, itu perlu eksplorasi"* (Ahmad Suaedy, 2024).

Perubahan besar seperti ini tentunya akan banyak mendapatkan respon oleh ulama-ulama yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama, seperti penghapusan istilah "kafir" atau penggantian paradigma yang lebih inklusif, hal tersebut memerlukan dukungan yang luas, namun nyatanya untuk konteks ini tidak ada penolakan yang signifikan dari

para ulama atau kyai. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan bersama untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Namun, untuk menjadikan hal ini agenda internasional, tentu tidak mudah. Contoh hal yang ingin diangkat diangkat adalah Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Ahmad Suaedy menilai bahwa OKI, yang berbasis pada identitas agama, sebenarnya sudah tidak relevan dalam konteks Fiqih Peradaban. Sebab, Fiqih Peradaban ingin berfokus pada kewarganegaraan dan kemanusiaan, bukan pada agama semata. Namun, menghapus atau mereformasi OKI tentu bukan hal yang sederhana karena paradigma identitas agama masih sangat kuat di banyak negara, khususnya di Timur Tengah. Bahkan, meskipun negara-negara tersebut berada di bawah naungan PBB, mereka masih terikat dengan pola pikir identitas agama.

> *"Saya mengatakan bahwa istilah dalam buku internasional ya istilah dunia Islam itu sudah nggak relevan dengan adanya Fikih peradaban anda mesti menjelaskan itu, sekarang konotasi dari dunia Islam itu adalah OKI jadi negara yang beridologi Islam berdasarkan Islam atau mayoritas Islam itu oleh OKI disebut sebagai Dunia Islam. Sekarang tidak relevan lagi gitu. Nah makanya fikih Peradaban itu bukan hanya mengundang dari negara-negara Islam yang mayoritas Islam mengundang dari Amerika, dari Eropa, dari macam-macam negara untuk membahas tentang Islam dunia bukan saya menyebut itu kalau nggak salah di Kompas sekarang itu bukan lagi dunia Islam tapi Islam dunia ini yang menginterroduce itu PBNU di bawah Gus Yahya".* (Ahmad Suaedy, 2024)

Ahmad Suaedy juga menyoroti Israel sebagai contoh negara yang membangun identitas berbasis agama, yang menimbulkan konflik. Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak bisa dilakukan dengan pendekatan agama atau dengan perang langsung dari negara-negara Muslim terhadap Israel. Hal ini akan melanggar hukum internasional. Sebaliknya, PBB sebagai organisasi internasional yang mengatur tatanan dunia harus bertanggung jawab dalam menangani persoalan ini.

NU, sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, mendukung PBB untuk menjalankan tugasnya, termasuk dalam menangani konflik Israel. NU mendorong agar penyelesaian masalah ini dilakukan melalui jalur hukum internasional dan PBB, bukan melalui kekerasan. Hal ini juga merupakan pengingat bagi umat Islam agar tidak menggunakan kekerasan atas nama agama dalam konflik internasional. Dengan demikian, NU berperan penting dalam mendukung tatanan dunia yang berbasis pada hukum, kemanusiaan, dan kewarganegaraan, bukan pada identitas agama. Nahdlatul Ulama secara garis besar dalam Fiqih Siyasahnya menyoroti pentingnya beralih dari ideologi identitas agama menuju pendekatan yang lebih inklusif berbasis kemanusiaan. NU mendorong konsep Fiqih Peradaban untuk mengubah cara pandang umat Islam dalam menghadapi berbagai isu global, dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional.

BAB III

MUNCULNYA PERAN NU DALAM MODERASI INTERNASIONAL, PADA MUKTAMAR INTERNASIONAL FIQIH PERADABAN TAHUN 2019 – 2023

3.1 Sejarah Berdirinya Muktamar Internasional Fiqih Peradaban

Muktamar Internasional Fiqih Peradaban lahir sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan global pada zaman modern yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang ajaran agama, etika, dan kearifan lokal. Dalam konteks fiqih, yang berarti pemahaman hukum Islam, muktamar ini menjadi wahana bagi para ulama dan cendekiawan Muslim dari berbagai belahan dunia untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangan mereka tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks peradaban modern.

Muktamar Internasional Fiqih Peradaban tidak muncul begitu saja, melainkan melalui serangkaian perkembangan dan persiapan yang matang. Sejarahnya dapat ditelusuri ke upaya-upaya kolaboratif antarlembaga dan individu yang peduli akan peran agama dalam membangun peradaban yang adil dan beradab. Sejumlah forum diskusi, seminar, dan konferensi regional dan internasional telah menjadi landasan bagi muktamar ini.

Salah satu tonggak penting dalam perjalanan menuju Muktamar Internasional Fiqih Peradaban adalah meningkatnya kesadaran akan perlunya dialog antarbudaya dan antaragama di tengah meningkatnya polarisasi dan konflik global. Organisasi-organisasi internasional, institusi pendidikan tinggi, dan kelompok masyarakat sipil mulai menggalang dukungan untuk inisiatif semacam itu.

Forum ini memiliki tujuan dan visi yang kuat dalam menyediakan platform bagi dialog antaragama yang mendalam dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk merumuskan kerangka kerja yang dapat membantu masyarakat Muslim dan non-Muslim memahami prinsip-prinsip fiqih dalam konteks peradaban yang beragam. Selain itu, muktamar ini juga bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan pemahaman saling menghormati antara berbagai kelompok dan komunitas.

Visi kepedepan dari muktamar ini mencakup terciptanya lingkungan yang kondusif bagi dialog yang konstruktif, dimana perbedaan dipahami sebagai sumber kekayaan dan bukan sebagai penyebab konflik. Dengan demikian, muktamar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun jembatan antara budaya-budaya yang berbeda dan menghasilkan solusi-solusi yang inklusif terhadap tantangan-tantangan global.

Muktamar Internasional Fiqih Peradaban memiliki peran yang sangat penting dalam menghadirkan suara dan perspektif Islam yang moderat, inklusif, dan progresif dalam diskursus global tentang agama, keadilan, dan perdamaian. Para ulama dan cendekiawan Muslim yang hadir di muktamar ini memainkan peran kunci dalam menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip fiqih dalam konteks zaman kita yang terus berubah.

Kontribusi muktamar ini tidak hanya terbatas pada ranah akademis, tetapi juga membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya di berbagai belahan dunia. Dengan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, pluralisme, dan toleransi, muktamar ini berfungsi sebagai motor perubahan positif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Muktamar Internasional Fiqih

Peradaban merupakan cerminan dari semangat kolaboratif dan inklusif dalam memahami dan menghadapi tantangan-tantangan peradaban modern. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, muktamar ini membuktikan bahwa agama, dalam hal ini Islam, dapat menjadi sumber inspirasi dan solusi bagi berbagai masalah kompleks yang dihadapi manusia saat ini. Dengan mempertahankan semangat dialog dan kerjasama lintas budaya, muktamar ini akan terus menjadi pelopor dalam membangun dunia yang lebih toleran, harmonis, dan berkeadilan.

3.2 Peran Nahdlatul Ulama dalam Muktamar Internasional Fiqih Peradaban

Nahdlatul Ulama (NU) telah memegang peran yang signifikan dalam sejarah Muktamar Internasional Fiqih Peradaban (MIFP). Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan di dunia, NU tidak hanya menjadi pelaku aktif dalam MIFP, tetapi juga menjadi pembawa pesan moderasi, toleransi, dan inklusivitas dalam diskusi-diskusi tersebut. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi peran NU dalam sejarah MIFP dan dampaknya terhadap pemahaman Islam yang moderat dan inklusif.

Sejak awal, NU telah aktif terlibat dalam MIFP sebagai wadah untuk memperjuangkan pandangan-pandangan moderasi Islam di tingkat internasional. Melalui partisipasi dalam diskusi-diskusi, perwakilan NU telah membawa suara moderasi yang khas, mempromosikan nilai-nilai toleransi, dialog antaragama, dan perdamaian. Salah satu kontribusi utama NU dalam MIFP adalah dalam penyelesaian isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh dunia Islam. NU telah memainkan peran penting dalam membahas isu-isu seperti ekstremisme, radikalisme, hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan beragama. Melalui pemikiran-pemikiran dan gagasan-

gagasan yang dibagikan, NU telah membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Islam dapat menjadi sumber solusi bagi tantangan-tantangan tersebut.

NU juga telah berperan dalam pembaruan fikih dan penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks modern. Melalui diskusi-diskusi tentang bagaimana prinsip-prinsip fikih dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan sehari-hari, NU telah memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana Islam dapat berkembang dan bertahan di era modern. Adapun Praktik diplomasi internasional NU tidak hanya terbatas pada upaya memperjuangkan kepentingan Muslim Indonesia, tetapi juga pada upaya mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerjasama antarbangsa. Prinsip-prinsip yang mendasari praktik diplomasi NU mencakup nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, dan perdamaian, dijelaskan pada jurnal yang ditulis oleh Andi Purwono berjudul *Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama* (Purwono, 2013), antara lain;

Pertama, Kemanusiaan yang Universal; Menurut pandangan NU, Islam mengajarkan untuk menghormati martabat setiap manusia tanpa memandang agama, ras, atau budaya. Dalam praktik diplomasi, NU berkomitmen untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan mengatasi penderitaan umat manusia di berbagai belahan dunia.

Kedua, Kesetaraan dan Keadilan; NU memperjuangkan hak-hak setiap individu dan kelompok tanpa pandang bulu, dan menolak segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Dalam konteks internasional, NU mendukung upaya-upaya untuk mencapai keadilan global dan distribusi yang merata dari sumber daya dunia.

Ketiga, Perdamaian dan Toleransi; Perdamaian dan toleransi adalah nilai-nilai sentral dalam ajaran Islam dan juga dalam praktik diplomasi NU. NU percaya bahwa dialog antarbudaya dan antaragama merupakan kunci untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di dunia. Dengan mempromosikan pemahaman saling menghormati dan kerjasama antarbangsa, NU berupaya untuk mengatasi konflik dan meningkatkan stabilitas global.

Keempat adalah Kerjasama Antarbangsa: NU memandang kerjasama antarbangsa sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan semua pihak. Melalui partisipasi aktif dalam forum-forum internasional dan kemitraan dengan organisasi-organisasi internasional, NU berusaha untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain dan masyarakat internasional.

Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam konteks global telah menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerjasama antarbangsa. NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah mampu memperluas cakupan pengaruhnya di tingkat internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam yang moderat dan inklusif dalam berbagai inisiatif diplomatiknya. Di tengah dinamika geopolitik yang kompleks, praktik diplomasi NU mewakili suara yang memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan dialog antarbudaya.

Dialog Antaragama dan Antarkultur adalah salah satu fokus utama praktik diplomasi NU. Nahdlatul Ulama mempromosikan dialog antaragama dan antarkultur sebagai sarana untuk membangun pemahaman saling menghormati dan kerjasama lintas budaya. NU menyadari bahwa konflik dan ketegangan antaragama merupakan tantangan serius dalam tatanan global, oleh karena itu, melalui berbagai forum

internasional, NU memfasilitasi pertemuan antara pemimpin agama dan tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang untuk membahas isu-isu kemanusiaan dan mencari solusi bersama.

Diplomasi NU juga mencakup upaya untuk memperjuangkan pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat global. Dalam Jurnal Islam Nusantara dengan judul *Nahdlatul Ulama in Indonesia, a New Era with the "New Gus Dur"* yang ditulis oleh Mitsuo Nakamura mengatakan bahwa "NU percaya bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan akar dari banyak konflik di dunia, oleh karena itu, NU bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan, serta untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengatasi tantangan pembangunan" (Huzaifah et al., 2023).

Selain itu dalam konteks tersebut, Nahdlatul Ulama (NU) menerapkan konsep faith-based diplomacy dengan menggelar Muktamar Internasional Fiqih Peradaban sebagai salah satu bentuk diplomasi berbasis keagamaan atau jalur kedua dalam diplomasi damai. Faith-based diplomacy, yang mengandalkan nilai-nilai agama dalam upaya diplomasi dan resolusi konflik, menjadi jalan yang efektif dalam mempengaruhi pandangan politik dan sosial masyarakat di tingkat global. Melalui Muktamar Internasional Fiqih Peradaban, NU berupaya untuk menampilkan peran sentral agama, khususnya Islam, dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan penghargaan atas keberagaman.

"NU sebagai organisasi ulama juga ya representasi dari perkumpulan warga negara bukan Islam. Organisasi keislaman, tapi sebagai pribadi yang punya pandangan. Tentu kita melihat dia sebagai tokoh, cendekiawan itu, tapi bukan representasi. Ini bukan pertemuan para ulama Islam gitu. Maka, jadi harus dipahami apa itu Fiqih peradaban tadi itu ya, sebagai kemanusiaan dan ini hanya perspektifnya Islam gitu jadi ingin mendorong diri dari sini dari ideologi Identitas agama ke kewarganegaraan dan kemanusiaan." (Ahmad Suaedy, 2024)

Konsep faith-based diplomacy yang diterapkan oleh NU melalui Muktamar Internasional Fiqih Peradaban menekankan pada prinsip empati, komitmen pada non-kekerasan, kasih sayang, dan pengampunan sebagai pilar untuk merespons konflik. Diskusi yang terjadi dalam muktamar ini bertujuan untuk menciptakan konsensus bersama mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi pemandu untuk mengatasi konflik yang sering kali diwarnai oleh perbedaan ideologi dan kepercayaan. Selain itu, muktamar ini juga berfungsi sebagai platform bagi para pemimpin agama untuk mempromosikan toleransi, menentang ekstremisme, dan mendorong pendekatan yang moderat dalam kehidupan beragama, yang dikenal sebagai konsep Islam Nusantara yang diusung oleh NU.

Dalam konteks diplomasi jalur kedua, Muktamar Internasional Fiqih Peradaban berfungsi sebagai wadah informal yang memfasilitasi hubungan antar pemimpin agama dan tokoh masyarakat tanpa harus melalui jalur resmi diplomasi negara. Hal ini memungkinkan dialog yang lebih terbuka, fleksibel, dan inklusif untuk mendiskusikan

isu-isu sensitif. NU sebagai penyelenggara memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan Islam yang moderat dan damai kepada para pemimpin dari berbagai latar belakang, yang kemudian diharapkan dapat menyebarkan pesan ini ke komunitas mereka masing-masing.

Dalam penyelesaian konflik dan mediasi, NU berperan menjadi mediator dalam penyelesaian tersebut dengan memanfaatkan jaringan dan kepercayaannya dalam komunitas Muslim global, NU memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, baik itu konflik antaragama, konflik antarkomunitas, maupun konflik politik. Upaya mediasi NU bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas. Contoh seperti sikap dan gerakan NU untuk kepeduliannya di Palestina, sejak lama NU selalu melakukan penggalangan dana dan proses-proses diplomasi perdamaian untuk membawa perdamaian di Palestina. Dan hal tersebut telah dimulai sejak Tahun 1938 (Rijal Muhamazziq Z, 2017). Pada tahun 2020, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomatis dalam upaya menciptakan perdamaian di India, menyusul terjadinya bentrokan yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka (CNN Indonesia, 2020). Pada tahun 2022, NU sebagai inisiator sekaligus panitia penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) R20, sebuah forum internasional keagamaan pertama yang terintegrasi dalam rangkaian acara G20 (Hadza Min Fadhli Robby, 2022). KTT R20 bertujuan mempertemukan pemimpin agama global untuk membahas solusi atas masalah ekstremisme dengan menekankan nilai-nilai kesetaraan manusia. Indonesia ingin menunjukkan bahwa agama dapat berkontribusi dalam penyelesaian persoalan ekonomi dan politik global. Forum ini dihadiri organisasi besar

seperti Gereja Katolik Roma, Gereja Anglikan, Aliansi Injili Dunia, dan Liga Muslim Dunia, bahkan mengundang Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yaitu pemimpin organisasi paramiliter nasionalis Hindu sayap kanan asal India yang mengkonfirmasi hadir. Dari langkah tersebut NU berpotensi berhasil. Meski perlahan, RSS sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia membuka diri untuk mengubah dan memoderasi posisi politiknya.

PBNU menjelaskan bahwa undangan untuk kelompok tertentu dalam forum R20 dilandasi oleh tiga alasan utama. Pertama, R20 merupakan agenda yang melekat pada forum G20, sehingga struktur undangannya mengikuti pola keanggotaan G20. Sebagai bagian dari engagement group G20, R20 dirancang untuk melibatkan tokoh-tokoh agama yang mewakili negara-negara anggota G20 (Muhammad Syakir NF, 2022b).

India, yang merupakan anggota G20, menjadi salah satu negara yang berpartisipasi aktif dalam R20. PBNU menjelaskan jika pola ini diadopsi untuk menjaga keterwakilan negara-negara anggota secara proporsional dalam forum tersebut. Undangan G20 tidak hanya terbatas pada negara-negara anggota G20. Sebagai contoh, tokoh agama dari Vatikan dan Uni Emirat Arab turut diundang meskipun kedua negara tersebut bukan anggota G20. Kehadiran mereka dianggap penting karena peran strategis dan pengaruh besar yang dimiliki dalam dialog lintas agama di tingkat global.

Alasan kedua terkait dengan undangan untuk perwakilan dari Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organisasi yang dianggap memiliki pengaruh besar di India. PBNU menjelaskan bahwa NU, sebagai penyelenggara R20, berkoordinasi

dengan Pemerintah India untuk memastikan tokoh yang diundang sesuai dengan rekomendasi resmi. Dalam hal ini, Pemerintah India merekomendasikan perwakilan dari RSS karena organisasi tersebut merupakan akar kekuatan dari Partai Bharatiya Janata (BJP), yang saat ini berkuasa di India. Hal ini sejalan dengan posisi India yang akan memegang Presidensi G20 pada tahun 2023. Dengan demikian, menjaga hubungan baik antara Indonesia sebagai tuan rumah R20 dan India sebagai negara peserta G20 menjadi prioritas penting. PBNU juga menekankan bahwa tokoh-tokoh yang diundang dalam R20 adalah mereka yang tidak memiliki konflik dengan pemerintah, untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam dialog antaragama.

Ketiga, forum R20 dinilai sebagai ruang yang tepat untuk membahas isu-isu sensitif, termasuk kritik terhadap rekam jejak organisasi tertentu seperti RSS dalam memperlakukan minoritas. PBNU menilai bahwa kehadiran RSS dalam R20 justru membuka peluang untuk mendiskusikan masalah tersebut secara terbuka dan inklusif (Nuriel Shami Indirapasha, 2022). Dialog lintas agama menurut fiqih siyasah NU yang melibatkan berbagai perspektif diyakini dapat menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman bersama dan mencari solusi atas tantangan yang ada (Robby & Rizky, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa R20 tidak hanya sekadar menjadi perpanjangan dari forum G20, tetapi juga platform yang dirancang untuk mendorong dialog yang produktif dan relevan dengan isu-isu global, khususnya terkait dengan keberagaman dan toleransi.

> *"PBNU Ingin mengajak agama-agama di dunia untuk merefleksikan diri bahwa problem ketegangan perang di dunia ini adalah andil yang terbesar itu*

agama andil terbesar memang tidak selalu kelihatan misalnya kayak Israel-Palestina itu kan kelihatannya inter-nation atau antar bangsa. Tapi sebenarnya di bawah kesadaran itu ada agama termasuk Yahudi yang membuat negara Israel menjadi negara Yahudi itu pun masalah Begitu juga Palestina digambarkan sebagai negara Islam padahal Palestina itu negara bangsa. Ada banyak Kristen, ada banyak Yahudi juga ada. Jadi agar para pemuka agama itu melakukan refleksi dan kalau perlu koreksi terhadap agamanya, tafsir ya agama dan NU sudah melakukan, sedang melakukan paling tidak tentang penghapusan kafir dan lain-lain dan ee. Apa kali ini? Yang kedua, selama ini pertemuan-pertemuan agama-agama itu yang bicara itu adalah ahli orang kampus, pengamat, wartawan." (Ahmad Suaedy, 2024)

"Nah ini yang diundang di R20 itu adalah para pemuka agama. Jadi mereka representasi dari agama-agama itu. Kan banyak aliran ya, jadi di dalam Islam itu juga banyak ada Wahabi dan lain-lain. Di dalam Protestan apalagi, Katolik. Jadi kita tidak lagi menghitung Islam Kristen Katolik tapi di dalam Katolik sendiri ada banyak cabang, di dalam Protestan banyak cabang, di dalam Islam ada, sesuai ada Muhammadiyah dan lain-lain. Jadi perwakilan dari agama-agama itu diundang untuk melakukan refleksi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia sebagai pemuka agama bisa menyampaikan kepada umatnya." (Ahmad Suaedy, 2024)

Pembukaan ruang-ruang diplomasi tersebut telah memberikan dampak yang cukup signifikan. NU telah membantu memperkuat pemahaman lintas budaya di tingkat global. Pemimpin agama dan tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang telah dapat bertemu dan berdiskusi tentang nilai-nilai bersama serta tantangan yang dihadapi umat manusia, yang pada akhirnya memperkuat kerjasama lintas budaya. Selain itu, mereka telah berhasil memediasi sejumlah konflik antaragama dan antarkomunitas di berbagai belahan dunia, membantu masyarakat yang terlibat untuk menemukan solusi damai atas perbedaan mereka. Ini tidak hanya menghasilkan penyelesaian konflik konkret, tetapi juga memperkuat perdamaian dan stabilitas di wilayah-wilayah yang terkena dampak (Faizin, 2020).

Melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional, NU telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai negara. Dengan memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan, NU telah membantu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Praktik diplomasi NU telah membantu memperkuat citra Islam moderat di tingkat global. NU telah menjadi contoh nyata bahwa Islam dapat menjadi sumber inspirasi untuk perdamaian, toleransi, dan keadilan, dan bahwa organisasi Islam dapat berperan secara positif dalam upaya membangun dunia yang lebih baik.

3.3 Konsep Faith-Based Diplomacy Sebagai Jalur Perdamaian

Diplomasi berbasis kepercayaan, atau yang sering disebut sebagai *Faith-Based Diplomacy,* merupakan pendekatan dalam diplomasi yang mengintegrasikan nilai-nilai

keagamaan, spiritualitas, dan etika dalam upaya mempromosikan perdamaian, dialog, dan kerjasama antarbangsa (Troy, 2008). Pendekatan ini memanfaatkan ajaran-ajaran agama untuk membangun jembatan antara berbagai komunitas agama, mengatasi konflik, dan memfasilitasi pembangunan berkelanjutan. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi konsep, praktik, serta dampak Faith-Based Diplomacy dalam konteks global.

Faith-Based Diplomacy didasarkan pada keyakinan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama dapat menjadi sumber inspirasi untuk perdamaian, keadilan, toleransi, dan kerjasama. Pendekatan ini mengakui peran penting agama dalam membentuk identitas dan perilaku manusia serta dalam membentuk pandangan dunia mereka. Faith-Based Diplomacy tidak hanya mengakui perbedaan antaragama, tetapi juga berusaha untuk memanfaatkan nilai-nilai agama sebagai sumber kekuatan yang positif untuk membangun hubungan yang harmonis antara berbagai komunitas.

Menurut Shireen T. Hunter dalam artikelnya yang berjudul *Religion and International Affairs: From Neglect to Over-Emphasis* mengatakan "Agama mempengaruhi karakter hubungan internasional dengan cara yang sama seperti sistem nilai dan ideologi lainnya dengan mempengaruhi perilaku negara dan semakin banyak aktor non-negara. Selain itu, meskipun sebagian besar tidak diakui, sebagai bagian sistem nilai negara dan aktor lain, agama selalu memainkan peran dalam menentukan karakter perilaku berbagai aktor internasional" (Hunter, 2010).

Dari kalimat Hunter kita memahami bahwa agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam karakter hubungan internasional, mirip dengan sistem nilai dan ideologi lainnya. Hal ini terjadi karena agama memengaruhi perilaku negara dan

semakin banyak aktor non-negara dalam dunia internasional. Meskipun pengaruhnya mungkin tidak selalu diakui secara terbuka, agama tetap menjadi bagian dari sistem nilai negara dan aktor lainnya, dan seringkali memainkan peran penting dalam menentukan karakter perilaku berbagai aktor internasional. Dengan kata lain, agama dapat membentuk pandangan dunia, tujuan, dan tindakan yang diambil oleh entitas internasional.

Seperti yang peneliti tulis dalam kerangka teori pada Bab I, terdapat empat faktor utama dalam penerapan diplomasi berbasis agama. Pertama, agama harus menjadi elemen penting dalam identitas salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam konflik. Kedua, pemimpin agama perlu dimobilisasi untuk berperan sebagai fasilitator dalam upaya perdamaian. Ketiga, situasi di mana dua kelompok agama besar terlibat dalam konflik lintas batas negara. Keempat, mediasi oleh pihak ketiga tidak boleh memasukkan elemen agama tertentu dalam prosesnya. Dari keempat faktor utama tersebut, harus mengandung nilai. Nilai-nilai tersebut harus terkandung dalam ruang lingkup kelompok kecil yang dibentuk sebagai resolusi konflik berbasis agama, seperti nilai empati, komitmen anti kekerasan, kemuliaan dalam kehidupan, kenyamanan dan kasih sayang.

NU menekankan pentingnya empati dalam setiap dialog antar pemimpin agama. Melalui Muktamar Internasional Fiqih Peradaban, NU mengajak peserta untuk memahami pandangan dan perasaan masing-masing kelompok yang terlibat dalam konflik (A. Syamsul Arifin, 2023). Empati ini menjadi dasar bagi para pemimpin agama untuk melihat konflik dari sudut pandang lawan mereka, sehingga dapat membangun rasa saling pengertian dan menghormati. Dengan adanya empati, diskusi

dalam muktamar ini menjadi lebih terbuka, di mana setiap peserta bisa menyuarakan aspirasi dan kekhawatiran mereka tanpa takut dihakimi. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya atmosfer dialog yang inklusif dan konstruktif.

Dalam ruang ini NU juga turut berkomitmen pada prinsip anti-kekerasan sebagai bagian integral dari faith-based diplomacy. NU menggunakan Muktamar Internasional Fiqih Peradaban untuk menegaskan bahwa agama harus menjadi sumber perdamaian, bukan konflik. Melalui forum ini, NU mendorong para pemimpin agama untuk menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama, dan sebaliknya, untuk mempromosikan metode damai dalam menyelesaikan perselisihan. Komitmen terhadap anti-kekerasan ini diperkuat dengan menyoroti contoh-contoh resolusi konflik yang mengedepankan dialog damai dan kerjasama antarumat beragama.

> *"Itu ada wawancara khusus di Tempo, di INEWS, di TV 1 itu adalah penasehat dari Presiden Nasional Palestina, yaitu namanya Mahmoud Al Habbash. Jadi itu itu kita sedang mendidik masyarakat dan negara-negara Islam agar melihatnya secara ya secara kebangsaan dan secara order dunia kita nggak bisa mendukung Hamas menyerang Israel itu adalah pelanggaran terhadap cara berpikir kita dunia order dan terhadap Islam, Fiqih Peradaban ini melanggar itu. Fiqih Peradaban mengakui sistem dunia, order dunia, PBB. Jadi kalau ada partai tertentu menyerang negara lain itu pelanggaran, kecuali kalau disepakati PLO yang menyerang itu baru". (Ahmad Suaedy, 2024)*

Muktamar Internasional Fiqih Peradaban diadakan dengan tujuan untuk menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak untuk hidup damai. Dalam diskusi ini, NU memperkenalkan konsep-konsep keagamaan yang mendukung penghargaan terhadap kehidupan manusia, tanpa memandang latar belakang budaya atau agama. Dengan cara ini, NU mendorong agar agama tidak digunakan sebagai alat untuk menindas atau menyingkirkan kelompok lain, tetapi sebagai pedoman untuk menghargai kehidupan dan kemuliaan semua individu (Purwono, 2020).

Nilai dari kenyamanan dan ketentraman juga diterapkan dalam faith-based diplomacy yang dilakukan NU. Dalam muktamar ini, NU menciptakan ruang yang nyaman bagi para pemimpin agama dari berbagai latar belakang untuk berbagi ide dan pengalaman mereka dalam menangani isu-isu global (Muluk et al., 2023). Dengan adanya suasana yang nyaman, para peserta lebih mudah menjalin hubungan yang harmonis dan meminimalisir prasangka negatif. Forum ini menjadi wadah untuk menciptakan rasa persaudaraan antarumat beragama yang melintasi batas-batas geografis dan budaya.

Nilai yang terakhir, yaitu kasih sayang atau belas kasih diwujudkan dalam Muktamar Internasional Fiqih Peradaban, NU menekankan bahwa kasih sayang adalah esensi dari ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam).

> *“Jadi (NU) ingin melendingkan Islam dalam konsep tata negara yang berbasis pada kewarganegaraan itu kemudian ada istilah Rahmatan Lil’alamin itu yang dibawa oleh Hasyim Muzadi Kemudian Pak Said Aqil itu membawa konsep apa ingat tidak? Islam Nusantara. Gus Yahya membawa konsep Fiqih Peradaban.*

Jadi sebenarnya ini sama, apa kalau Pribumisasi Islam masih mengacu kepada lokal, Rahmatali Alamin akan bawa ke atas, Islam Nusantara juga membawa lokal, nah Fiqih Peradaban ini ingin membawa Islam ke Internasional tapi basisnya tetap pemahaman yang berkembang tadi, sampai ke Islam Nusantara." (Ahmad Suaedy, 2024)

Melalui dialog dan diskusi yang diadakan, para pemimpin agama diajak untuk menyebarkan semangat kasih sayang ini ke komunitas mereka masing-masing. Dengan mengedepankan kasih sayang, konflik yang sebelumnya sulit diatasi diharapkan dapat diredakan dan diselesaikan dengan cara-cara yang lebih manusiawi dan damai.

Dalam bentuk diplomasi agama konsep jalur kedua terhadap menerapkan kelompok-kelompok kecil, Nahdlatul Ulama (NU) mendukung "Rule-Based International Order" (RBI) meskipun ada kritik terhadap penerapannya saat ini. Kritik tersebut bukan berarti menolak keberadaan sistem itu, melainkan menyoroti bahwa prinsip dan hukum internasional, termasuk regulasi PBB, tidak dijalankan sebagaimana mestinya. seperti posisi NU dalam menerima Pancasila pada masa pemerintahan Soeharto. NU mendukung Pancasila agar prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan aslinya, sebagaimana kritik NU saat ini terhadap PBB dan hukum internasional: agar kembali ke jalur yang benar sesuai regulasi yang ada.

"Jadi penerimaan itu bagian dari dukungan agar hukum internasional dan PBB itu dilaksanakan dengan sesuai dengan itu. Jadi itu mungkin kritik tapi sebaliknya gitu. Kritik berupa dukungan. Jadi mendukung PBB agar PBB melaksanakan regulaisinya sendiri sekarang kan menyimpang sama dengan

waktu Pancasila ya waktu 84 baca nggak? Estitor 26 itu. Jadi dulu itu Soeharto itu menyimpang dari Pancasila jadi penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai sekutu itu supaya Soeharto kembali kepada prinsip Pancasila makanya di sana ada bilang menjalankan Pancasila sesuai dengan murni dan konsekuen itu artinya kembali ke konsep Pancasila karena Soeharto sedang melanggar sama dengan PBB sekarang". (Ahmad Suaedy, 2024)

Maka secara konsep utama dari diplomasi akan berfungsi ketika kekuasaan sedang bekerja dan ketika pihak-pihak yang sedang bertikai akan beralih ke jalan kekerasan. Dengan hal tersebut maka *Faith-Based Diplomacy* adalah sebuah upaya perdamaian yang dilakukan dengan pendekatan secara spiritual dan etika keagamaan. Sebagai sarana faith-based diplomacy, Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam forum Muktamar Internasional Fikih Peradaban menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan konflik dan mempromosikan perdamaian. Dengan menempatkan agama dan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan utama, muktamar ini mendorong dialog yang saling menghormati dan memperkaya antara berbagai tradisi agama, yang pada gilirannya dapat membantu mengatasi mispersepsi, prasangka, dan konflik yang seringkali timbul akibat ketidakpahaman antarbudaya.

Dalam forum tersebut, Nahdlatul Ulama ingin menekankan pentingnya memahami konsep ulama dunia dari sudut pandang yang lebih luas dan tidak hanya berdasarkan identitas agama semata. Sering kali, konsep ulama dipersepsikan hanya sebagai representasi dari identitas agama, khususnya Islam. Namun, pandangan ini dianggap keliru. Ahmad Suaedy menjelaskan bahwa dalam konteks tertentu, undangan

kepada para ulama atau cendekiawan agama tidak mewakili institusi keagamaan tempat mereka berasal, seperti Al-Azhar, tetapi lebih kepada pandangan pribadi dari masing-masing ulama tersebut.

> *"Nah itu yang kadang-kadang salah paham konsep ulama dunia itu adalah konsep identitas agama Itu yang sedang digugat. Maka kita mengundang orang per orang representasi jadi pembicara Jadi misalnya kita mengundang Al Azhar Ya bukan Al Azharnya ya ulamanya itu pribadi punya pandangan apa . Bukan AlAzhar sebagai identitas agama Islam gitu Jadi ya NU sebagai organisasi ulama juga ya representasi dari perkumpulan warga negara bukan Islam. Organisasi keislaman, tapi sebagai pribadi yang punya pandangan. Tentu kita melihat dia sebagai tokoh, cendekiawan itu, tapi bukan representasi. Ini bukan pertemuan para ulama Islam gitu. Maka, jadi harus dipahami apa itu Fiqih peradaban tadi itu ya, sebagai kemanusiaan dan ini hanya perspektifnya Islam gitu jadi ingin mendorong diri dari sini dari ideologi Identitas agama ke kewarganegaraan dan kemanusiaan".* (Ahmad Suaedy, 2024)

Ketika NU, sebagai organisasi keagamaan, mengundang ulama untuk berbicara dalam forum tertentu, yang diundang bukan institusinya, melainkan orang atau individu dengan pandangan pribadi mereka. Dalam hal ini, meskipun seseorang berasal dari institusi seperti Al-Azhar, pandangan yang disampaikan adalah pandangan pribadi, bukan sebagai representasi institusi tersebut atau identitas Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, forum tersebut bukanlah pertemuan para ulama yang mewakili

Islam sebagai agama, melainkan individu yang menyampaikan pandangan mereka berdasarkan pengalaman dan pemikiran pribadi.

Dalam hal ini, NU sendiri sebagai organisasi ulama juga bukan sekadar representasi dari Islam sebagai agama. NU mewakili sekelompok warga negara, di mana para ulama yang terlibat bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai individu yang memiliki pandangan intelektual yang beragam. Pandangan-pandangan tersebut tidak selalu merepresentasikan agama Islam dalam pengertian yang sempit, tetapi lebih pada perspektif kemanusiaan yang lebih luas. Oleh karena itu, partisipasi ulama dalam forum tersebut tidak boleh dilihat sebagai pertemuan yang hanya berfokus pada pandangan keagamaan, melainkan sebagai kesempatan untuk membahas isu-isu kemanusiaan dari sudut pandang yang lebih komprehensif.

Konsep "Fiqih Peradaban" yang diangkat juga harus dipahami dalam kerangka ini. Fiqih Peradaban bukan hanya terbatas pada aspek hukum Islam semata, tetapi juga mencakup perspektif kemanusiaan yang lebih luas. Ini berarti bahwa pandangan Islam dalam hal ini tidak hanya berhubungan dengan identitas agama, tetapi juga dengan bagaimana agama tersebut berkontribusi pada kemanusiaan dan peradaban. Dengan demikian, ada dorongan untuk menggeser diskusi dari sekadar ideologi identitas agama ke arah kewarganegaraan dan kemanusiaan yang lebih inklusif.

Keseluruhan pandangan ini menekankan bahwa penting untuk memahami ulama dan pandangan keagamaan mereka dalam konteks kemanusiaan yang lebih luas. Ulama tidak hanya dilihat sebagai representasi agama, tetapi juga sebagai individu dengan pandangan intelektual dan sosial yang berkontribusi pada peradaban manusia secara umum. Forum atau diskusi yang diadakan oleh NU, misalnya, bertujuan untuk

mengajak para ulama untuk berbicara mengenai isu-isu yang lebih luas daripada sekadar agama, dan untuk mendorong pemahaman yang lebih inklusif mengenai peran agama dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan demikian, agama tidak hanya dilihat sebagai identitas eksklusif, tetapi sebagai pandangan yang berkontribusi pada kemajuan bersama.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Fiqih Siyasah ala Nahdlatul Ulama (NU) dalam solidaritas perdamaian dunia merupakan pendekatan politik Islam yang berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan perdamaian global. NU memandang fiqih siyasah sebagai alat untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dalam hubungan internasional. Melalui pendekatan ini, NU berkomitmen menjaga perdamaian dunia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam moderat, toleransi, dan inklusivitas. Solidaritas perdamaian dunia yang diusung NU menegaskan pentingnya kerjasama antarnegara dan antarumat beragama untuk mencegah konflik dan mengatasi tantangan global seperti radikalisme, terorisme, dan ketidakadilan sosial. Dalam konteks global, NU berusaha memainkan peran strategis dalam diplomasi perdamaian dengan menekankan pentingnya dialog antaragama dan penyelesaian konflik melalui pendekatan damai. Fiqih siyasah NU yang mendasarkan pada moralitas dan etika Islam diharapkan mampu menjadi jembatan bagi terwujudnya dunia yang lebih damai dan adil.

Dalam konteks moderasi internasional melalui Muktamar Internasional Fiqih Peradaban tahun 2019-2023 menandai komitmen organisasi Nahdlatul Ulama untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. NU berupaya memperkuat wacana moderasi Islam, baik di tingkat nasional maupun

internasional, dengan menekankan pada prinsip-prinsip toleransi, keadilan, dan kemaslahatan. Muktamar ini menjadi ajang bagi NU untuk menegaskan pandangan Islam moderatnya dalam menghadapi tantangan global seperti radikalisme, ekstremisme, dan konflik antarumat beragama. NU berhasil menjadikan fiqih peradaban sebagai landasan penting dalam membangun dialog antaragama dan antarbangsa, serta dalam mengatasi isu-isu kontemporer melalui pendekatan yang inklusif. Selama periode 2019-2023, NU memperkuat peranannya dalam diplomasi internasional, berkontribusi dalam menciptakan perdamaian global, dan menjembatani perbedaan antarbudaya dan agama. Dengan demikian, NU tidak hanya berperan sebagai organisasi keagamaan nasional, tetapi juga sebagai aktor penting dalam moderasi global, menjadikan Islam sebagai solusi bagi peradaban dunia yang lebih adil dan harmonis.

4.2. Saran

Nahdlatul Ulama (NU) perlu memperkuat perannya dalam diplomasi internasional dengan lebih aktif terlibat dalam forum-forum global yang membahas isu perdamaian dan hubungan antarnegara. Ini mencakup peningkatan kerja sama dengan organisasi internasional serta negara-negara lain untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi dan perdamaian. Melalui kerjasama yang lebih intensif dan strategis, NU dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mengatasi konflik dan memperkuat harmonisasi antarbangsa.

Selanjutnya pada sektor Pendidikan, NU dapat memberikan pemahaman Pendidikan mengenai perdamaian yang merupakan kunci dalam menanamkan nilai-nilai moderasi dan toleransi sejak dini. Oleh karena itu, pendidikan mengenai fiqih siyasah ala NU harus lebih disosialisasikan baik di kalangan umat Islam maupun masyarakat umum. Inisiatif ini dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum pendidikan formal yang menyentuh aspek-aspek perdamaian dan toleransi, serta program-program non-formal yang melibatkan masyarakat secara luas.

Lembaga-lembaga di bawah NU yang bergerak di bidang politik dan sosial harus diberdayakan lebih lanjut untuk memainkan peran aktif dalam mediasi konflik. Dengan memperkuat kapasitas lembaga-lembaga ini, NU dapat lebih efektif dalam upaya-upaya mediasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut akan membantu mengatasi berbagai tantangan konflik dan ketidakstabilan dengan pendekatan yang konstruktif dan damai.

NU juga perlu terus memperkuat narasi Islam moderat untuk melawan paham-paham radikal yang sering kali menjadi pemicu konflik. Penyebaran narasi ini harus dilakukan melalui berbagai media, termasuk media massa dan media sosial. Dengan cara ini, NU dapat mempengaruhi opini publik dan memberikan alternatif yang damai serta inklusif terhadap ekstremisme.

Daftar Pustaka

A. Syamsul Arifin. (2023, February). *Gelar Muktamar Internasional, PBNU Harap Fiqih Peradaban Jadi Wacana Global* . Nu.or.Id. https://www.nu.or.id/nasional/gelar-muktamar-internasional-pbnu-harap-fiqih-peradaban-jadi-wacana-global-9xNLB

Adhayanto, O. (2011). KHILAFAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM. *JurnalIlmuPolitikdanIlmuPemerintahan*, *1*, 1–19.

Agus Suparno, B. (2012). *REFORMASI DAN JATUHNYA SOEHARTO* (1st ed.). Kompas.

Ahmad Suaedy. (2024). *Transkrip Wawancara Ahmad Suaedy 2024*.

Ahmad Zainul Hamdi. (2020, January 9). *Gus Dur, Megawati, dan Jeratan Oligarki* . Nu.or.Id. https://www.nu.or.id/opini/gus-dur-megawati-dan-jeratan-oligarki-dpgY8

Ainul Yatimul. (2023, February). *Mendialogkan Fikih Peradaban dalam Penguatan Moderasi Beragama dan Bela Negara*. Timesindonesia.Co.Id. https://timesindonesia.co.id/kopi-times/446113/mendialogkan-fikih-peradaban-dalam-penguatan-moderasi-beragama-dan-bela-negara

Ajie Najmuddin. (2022, March 15). *Peran Penting NU dalam Penyelenggaraan KIAA* . Nu.or.Id. https://www.nu.or.id/fragmen/peran-penting-nu-dalam-penyelenggaraan-kiaa-3-QxStq

CNN Indonesia. (2020, February 27). *PBNU Dorong Pemerintah Berperan terkait Bentrok Umat di India*. Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200227171935-20-478829/pbnu-dorong-pemerintah-berperan-terkait-bentrok-umat-di-india

Fadli, M. R., & Sudrajat, A. (2020). KEISLAMAN DAN KEBANGSAAN: TELAAH PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY'ARI. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, *18*(1), 109. https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3433

Faizin, M. I. (2020). *PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM PROSES PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN PADA 2011-2018* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Jakarta.

Farih, A. (2016). NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI). *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *24*(2), 251–284. https://doi.org/10.21580/ws.2016.24.2.969

Fathoni. (2018, September 17). *Penjelasan KH Wahab Chasbullah soal Waliyyul Amri Dharuri Bissyaukah*. Nu.or.Id. https://www.nu.or.id/fragmen/penjelasan-kh-wahab-chasbullah-soal-waliyyul-amri-dharuri-bissyaukah-otvjN

Fuad, A. J. (2020). Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, *31*(1), 153–168. https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.991

Hadza Min Fadhli Robby. (2022, October 31). *KTT Keagamaan G20 pertama akan dihadiri organisasi militan India Rashtriya Swayamsevak Sangh: langkah berani NU untuk wujudkan perdamaian global*. Theconversation.Com.

https://theconversation.com/ktt-keagamaan-g20-pertama-akan-dihadiri-organisasi-militan-india-rashtriya-swayamsevak-sangh-langkah-berani-nu-untuk-wujudkan-perdamaian-global-193516
Haidar, A. M. (1994). *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fikih Dalam Politik* (P. Utomo, Ed.). Gramedia Pustaka Utama.
Hidayat, K. (2014). Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila. *JurnalSosioteknologi*, *14*(2), 1–279. https://doi.org/https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2015.14.2.9
Hidayati, A. (2015). *NAHDLATUL ULAMA (NU) DI ERA REFORMASI: STUDI TENTANG MUSLIMAT NU PERIODE 2011-2014 DAN KHITTAH NU 1926*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.
Hunter, S. T. (2010). Religion and International Affairs: From Neglect to Over-Emphasis. *E-International Relation*. https://www.e-ir.info/2010/04/07/religion-and-international-affairs-from-neglect-to-over-emphasis/
Huzaifah, S., Haziq, M., Nakamura, M., Hamdani, Masudi, I., Muhtarom, A., Zahroh Zidni, E. S., Maarif, Z., Firdausy, H., Zidni, Z., & Firdausy, H. (2023). *Islam Nusantara; Journal for The Study of Islamic History and Culture*. *4*.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023, February). *Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1*. Menpan.Go.Id. https://menpan.go.id/site/berita-foto/muktamar-internasional-fikih-peradaban-1
Kendi Setiawan. (2023, February). *Rekomendasi Muktamar Internasional Fiqih Peradaban I: Menolak Khilafah, Mendukung PBB* . Nu.or.Id. https://www.nu.or.id/internasional/rekomendasi-muktamar-internasional-fiqih-peradaban-i-menolak-khilafah-mendukung-pbb-BXgyN
Khaerul Hadi, M. (2018). *KEMBALI KE KHITTAH 1926 DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH-MASALAH NAHDLATUL ULAMA PASCA MUKTAMAR KE-27 DI SITUBONDO (1984-1999)*. UIN Sunan Kalijaga.
Muhammad Syakir NF. (2022a, May 17). *Peran NU Jelang Reformasi* . Nu.or.Id. https://www.nu.or.id/fragmen/peran-nu-jelang-reformasi-woknG
Muhammad Syakir NF. (2022b, September 28). *3 Alasan PBNU Undang RSS India untuk Ikut Forum R20* . Nu.or.Id. https://nu.or.id/nasional/3-alasan-pbnu-undang-rss-india-untuk-ikut-forum-r20-VTM4m
Muluk, M. S., Tambunan, R. W., & Suryanto, A. B. (2023). NAHDLATUL ULAMA AND THE TRILOGY OF BROTHERHOOD. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *4*(1), 54–70. https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i1.154
Munawir Aziz. (2017, January 20). *Mengapa Gus Dur Membentuk Fordem?* . Nu.or.Id. https://nu.or.id/fragmen/mengapa-gus-dur-membentuk-fordem-gxpqv
Nuriel Shami Indirapasha. (2022, September 22). *Atasi Ancaman pada Kaum Minoritas, PBNU Bangun Dialog dengan India dan RSS* . Nu.or.Id. https://www.nu.or.id/nasional/atasi-ancaman-pada-kaum-minoritas-pbnu-bangun-dialog-dengan-india-dan-rss-hdhWR
Nurjaman, A., & Sulaeman, A. (2020). Peran KH. Idham Chalid dalam Konferensi Islam Asia Afrika di Kota Bandung Tahun 1965. *Historia Madania* , *4*(1), 1–30. https://kbbi.web.id/konferensi

Purwono, A. (2013). Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, *2*, 1–23. http://www.e-

Purwono, A. (2020). DIPLOMASI KIAI NAHDLATUL 'ULAMA (NU) MELALUI KONFERENSI ULAMA INTERNASIONAL. *SosioDialektika*, 1–2. http://news.liputan6.com/read/2929927/kisah-kh-hasyim-muzadi-anak-tukang-roti-yang-go-

Rijal Muhamazziq Z. (2017, December 8). *Nahdlatul Ulama dan Solidaritas Palestina* . Nu.or,Id. Nahdlatul Ulama dan Solidaritas Palestina Sumber: https://www.nu.or.id/fragmen/nahdlatul-ulama-dan-solidaritas-palestina-7Ts3W ___ Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! https://nu.or.id/superapp (Android/iOS)

Rijal Mumazziq Z. (2017, September 1). *Peran NU untuk Perdamaian Dunia*. Nu.or.Id. https://www.nu.or.id/opini/peran-nu-untuk-perdamaian-dunia-iPFdb

Robby, hadza M. F., & Rizky, Z. M. (2023). International Conference of International Islamic College Bangkok, KRIRK University. *RETHINKING THE ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL INTEGRATION OF ISLAMIC WORLD IN THE CONTEMPORARY ERA*, 1–33.

Rohimat, R., Hakim, A., Djati, G., Ikopin, B., Sumedang, J., & Barat, J. (2019). *TEOLOGI PEMBEBASAN DAN DEMOKRASI MENURUT GUS DUR* (Vol. 4, Issue 1).

Rusliwa Somantri, G. (2005). *MEMAHAMI METODE KUALITATIF* (Vol. 9, Issue 2).

Sholihuddin, M., & Jazil, S. (2021). *Konstruksi Fikih Kebangsaan Nahdlatul Ulama (Kajian terhadap Peran NU Perspektif Fiqh Siyasah)*. *24*(1).

Sugiarto, A. (2010). *DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ABDURRAHMAN WAHID*. Universtas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Suhanda, I. (2010). *PERJALANAN POLITIK GUS DUR* (2nd ed.). Kompas.

Sukamto, A. (2013). KETEGANGAN ANTAR KELOMPOK AGAMA PADA MASA ORDE LAMA SAMPAI AWAL ORDE BARU: Dari Konflik Perumusan ideologi Negara Sampai Konflik Fisik. *Jurnal Teologi Indonesia*, *1*(1), 25–47. https://doi.org/https://doi.org/10.46567/ijt.v1i1.90

Suyud, R., Syam, E., Yusuf, M., Nugroho, A., Lailiyah, S., & Saefullah, M. (2023). Refleksi Satu Abad Nahdhatul Ulama: Dialektika Capaian dan Tantangan. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)*, *2*(1).

Syarif Hidayat Santoso. (2014, August 31). *NU dan Gaya Politik Ta'ridh* . Nu.or.Id. https://nu.or.id/fragmen/nu-dan-gaya-politik-tarsquoridh-3-habis-vl42C

Syifa Arrahmah. (2022, December). *Muktamar Internasional Fiqih Peradaban: Upaya NU Berkontribusi Wujudkan Perdamaian di Dunia Global* . Nu.or.Id. https://www.nu.or.id/nasional/muktamar-internasional-fiqih-peradaban-upaya-nu-berkontribusi-wujudkan-perdamaian-di-dunia-global-WpMtW

Troy, J. (2008). Faith-Based Diplomacy under Examination. *The Hague Journal of Diplomacy*, *3*(3), 209–231. https://doi.org/10.1163/187119108X378088

Widarda, D., & Rachman, B. M. (2023). Dinamika NU: Komitmen Kebangsaan, Semangat Kembali ke Khittah, serta Pemberdayaan Civil Society. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, *3*(3), 475–488. https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.30391

Yusrianto. (2014). PEMIKIRAN POLITIK DAN PERJUANGAN KH. M. HASYIM ASY'ARI MELAWAN KOLONIALISME. *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, *3*, 1–22.

LAMPIRAN

Teks Wawancara

Narasumber : Ahmad Suaedy (Ketua Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama Indonesia)

Tanggal : 18 Agustus 2024

Rayhan: Assalamualaikum Bapak saya Rayhan dari Universitas Islam Indonesia

Ahmad Suaedy: Waalaikumsalam, Santai aja mas.

Rayhan: Ini pertanyaannya itu sebenarnya lebih banyak seputar fiqih siyasah.

Ahmad Suaedy: Sek Sek.. Sebelum itu. Backgroundnya apa? Kenapa anda menulis ini?

Rayhan: Jadi sebenarnya saya selain tumbuh besar di lingkungan NU juga di jurusan Hubungan Internasional jadi saya rasa sedikit mahasiswa Hubungan Internasional yang menulis tentang ini apalagi di UII pak yang memang konteksnya di Jogja yang mana lingkungan Muhammadiyah, saya ingin membawa nilai-nilai NU. Jadi sebenarnya itu ide Muktamar Internasional Peradaban itu Pak, itu dibangun kapan Pak? Dan Itu sudah ada sebelum Gus Yahya atau itu memang inisiatif dari Gus Yahya sendiri?

Ahmad Suaedy: Ya jadi di dalam NU itu ada proses pemikirannya yang sebenarnya tujuannya bagaimana mempertemukan antara ide Islam dengan kemanusiaan nasionalisme gitu kan pada dasarnya itu tabrakan kan, sementara nasionalisme berbasis warga negara, tidak pandang agama dalam konsep Islam klasik itu berbasis agama Nah di dalam fiqih itu masih seperti itu sampai sekarang. Jadi fikih itu belum dibungkus, belum diwadahi, belum dicover dalam perspektif kewarganegaraan, nanti dicari ya konsep kewarganegaraan itu seperti apa, termasuk di OKI, di OKI itu masih belum

keluar dari agama sebagai ideologi identitas. Maka OKI itu organisasi yang merangkum negara-negara Islam gitu meskipun tidak semua negara berbasis ideologi Islam, Indonesia misalnya enggak, tapi mereka memakai kerangka ideologi identitas Islam gitu. Nah, pencarian pencarian ini itu sudah lama mulai dari Qitohbihi ya misalnya Rahmatan Lil'alamin Ya kalau Gus Dur itu menyebut sebagai Pribumisasi Islam, anda cari sendiri nanti yah bacaan Gus Dur itu ada istilah Pribumisasi Islam. Jadi ingin melendingkan Islam dalam konsep tata negara yang berbasis pada kewarganegaraan itu kemudian ada istilah Rahmatan Lil'alamin itu yang dibawa oleh Hasyim Muzadi Kemudian Pak Said Aqil itu membawa konsep apa ingat tidak? Islam Nusantara. Gus Yahya membawa konsep Fiqih Peradaban. Jadi sebenarnya ini sama, apa kalau Pribumisasi Islam masih mengacu kepada lokal, Rahmatali Alamin akan bawa ke atas, Islam Nusantara juga membawa lokal, nah Fiqih Peradaban ini ingin membawa Islam ke Internasional tapi basisnya tetap pemahaman yang berkembang tadi, sampai ke Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara kan nama lokal, jadi susah untuk ditawarkan sehingga harus dibungkus dengan sesuatu yang baru, basisnya sama, ingin membawa Islam ke arah kewarganegaraan tadi, kemanusiaan lah ada konsep Islam humanitarian segala itu itu. Jadi Gus Yahya melanjutkan tapi memperluas dan memperluas cakupan dan sasaran sasarannya internasional. Bagaimana supaya Islam bisa terlibat di dalam proses dunia, didalamnya itu kan ada legitimasi terhadap keberadaan negara Nation State dan eksistensi PBB dan juga hak asasi manusia jadi ada tiga komponen di dalam Fiqih Peradaban tadi dari sisi fikihnya sendiri topik-topik atau elemen-elemen yang di dalam fikih itu masih bisa dibawa ke sekarang.

Rayhan: Dalam Fiqih itu ya pak?

Ahmad Suaedy: Kan banyak buku-buku yang kolek kitab-kitab yang besar seperti yang ditulis oleh Syafi'i, Hanafi, Maliki dan lain sebagainya, dan KUA Materi itu masih bisa dipakai di zaman modern tapi bungkusnya apa namanya basisnya harus berubah dari ideologi identitas Islam ke ideologi humanitarian atau kewarganegaraan. Jadi intinya sebenarnya sebetulnya sehingga Islam ini bisa ditawarkan ke atas, Anda bisa baca di paper saya, saya lupa lupa ingat tapi kira-kira saya menjelaskan itu

Rayhan: Oh berarti saya izin konfirmasi Pak. Berarti memang sebenarnya ide dari fiqih peradaban ini sudah lama cuman…

Ahmad Suaedy: Isinya sudah lama ya

Rayhan: Isinya lama tapi memang namanya yang berubah

Ahmad Suadey: Sasarannya jangan namanya. Tadi cakupan sasaran itu.

Rayhan: Oke siap Terus gini Pak ide dasarnya dari fiqih peradaban ini sama kaitannya dengan fiqih Siyasah NU itu kayak gimana?

Ahmad Suaedy: Ya Fiqih Siyasah itu masih menggunakan basis ideologi identitas agama itu. Itu Fiqih Siyasah itu misalnya ada Darul Islam. Darul Harroh, Darul Aman dan lain-lain itu adalah fiqih siyasah itu. Nah, formula-formula di dalamnya itu masih bisa dipakai tapi paradigmanya itu harus berubah. Tidak ada lagi Darul Islam, Darul Haroh, Darul Aman itu tidak ada lagi. Semua negara adalah sama warga negaranya itu sama agamanya apa pun di bawah negara nation. Sekarang kan semua negara nation

meskipun kerajaan berbagai bentuk negara itu tapi semua nation, nation dalam arti kesetaraan warga negara tadi itu dan Human Right. Jadi makanya sebenarnya yang saya tulis di situ kalau nggak salah ya kalau nggak ya di Kompas di Jakarta Pusat. Saya mengatakan bahwa istilah dalam buku internasional ya istilah dunia Islam itu sudah nggak relevan dengan adanya Fikih peradaban anda mesti menjelaskan itu, sekarang konotasi dari dunia Islam itu adalah OKI jadi negara yang beridologi Islam berdasarkan Islam atau mayoritas Islam itu oleh OKI disebut sebagai Dunia Islam. Sekarang tidak relevan lagi gitu. Nah makanya fikih Peradaban itu bukan hanya mengundang dari negara-negara Islam yang mayoritas Islam mengundang dari Amerika, dari Eropa, dari macam-macam negara untuk membahas tentang Islam dunia bukan saya menyebut itu kalau nggak salah di Kompas sekarang itu bukan lagi dunia Islam tapi Islam dunia ini yang menginterroduce itu PBNU di bawah Gus Yahya. Jadi anda perlu dalam satu subb saya kira perlu membahas itu Jadi kontak dari fikih Peradaban ini adalah keluar dari mainstream anggapan umum atau doktrin umum ada dunia Islam sekarang udah nggak ada, yang ada adalah Islam dunia Jadi Islam Eropa, Islam Amerika itu sama kedudukannya dengan Islam Indonesia, Islam Arab Saudi, Islam itu. Jadi OKI sebenarnya harus dibubarkan atau diubah bentuknya.

Rayhan: Ini begini pak. bagaimana para Kyai Khos di jajaran Syuriah itu mengonsepsi Fiqih Siyasah NU dalam tataran global sama kenapa NU itu memilih untuk turut mendukung rule bis international order padahal sistem ini sedang dikritik karena tidak mampu menjawab isu genosida di Israel dan konflik di belahan dunia lainnya

Ahmad Suaedy: Ya, oke. Jadi yang soal Kyai tadi itu Kyai itu sudah global misalnya dalam Munas NU tahun 2019 di mana? Purwakarta ya itu menghapuskan kategori kafir.

Rayhan: Oh ya

Ahmad Suaedy: Inget gak atau baca gak? Atau nulis juga?

Rayhan: Non muslim ya pak ya pakainya?

Ahmad Suadey: Enggak, pakainya warga negara. Jadi enggak ada Islam non Islam tidak ada lagi kafir, dibubahnya menjadi muattin. Muattin itu warga negara Jadi tidak ada lagi kategori warga negara itu adalah kategori semua warga negara itu loh warga negara, tidak ada muslim non muslim, tidak ada kafir non kafir. Nah itu global itu meskipun diputuskan di mana di kampung ya, tapi global global sama dengan penerimaan Pancasila yang berbasis pada kewarganegaraan itu global. Implikasinya adalah semua warga negara di belakang sama di depan hukum pemerintahan dan lain-lain. Yang kedua semua warga negara adalah umat manusia, gitu Jadi warga negara Indonesia, Malaysia itu semuanya adalah manusia punya hak asasi manusia. Jadi di samping kewarganegaraan juga ada asasi manusia Itu tentang Kyai Itu sebenarnya banyak ada keuputusan-keputusan yang seperti itu. Tapi yang paling radikal, yang paling ekstrim itu, kirakira itu menghapuskan kategori kafir itu sudah puncaknya puncaklah itu. Itu di dalamnya ada kewarganegaraan dan ada konsep hak asasi manusia.

Rayhan: Untuk yang kedua apa Kenapa NU itu memilih untuk ikut mendukung Ruled Based International Order padahal sedang dikritik

Ahmad Suaedy: Yang jadi kritik itu tidak meniadakan ya, kritik itu justru terhadap tidak berlaku, tidak terimplementasinya prinsip dan kedudukan, bukan ada tidak adanya.

Misalnya kritik terhadap PBB itu tidak berarti PBB harus tidak ada. Kalau tidak ada perang sendiri itu semua negara, Malaysia-Indonesia perang, kemudian perang sendiri. Nah, jadi kritiknya adalah mengukuhkan supaya regulasi PBB, regulasi hukum internasional itu dijalankan kembali ke jalan yang benar nah jadi kritiknya jadi NU justru ingin menegakkan regulasi yang ada sekarang yang sedang tidak dijalankan.

Rayhan: Paham, jadi Rule Based Internasional Order hari ini itu tidak berjalan sebagaimana sebagai mestinya?

Ahmad Suaedy: Prinsip dan basisnya dan lain-lain ya

Rayhan: Sehingga NU mengamini itu agar Rule-based International Order ini ?

Ahmad Suaedy: Jadi penerimaan itu bagian dari dukungan agar hukum internasional dan PBB itu dilaksanakan dengan sesuai dengan itu. Jadi itu mungkin kritik tapi sebaliknya gitu. Kritik berupa dukungan. Jadi mendukung PBB agar PBB melaksanakan regulaisinya sendiri sekarang kan menyimpang sama dengan waktu Pancasila ya waktu 84 baca nggak? Estitor 26 itu. Jadi dulu itu Soeharto itu menyimpang dari Pancasila jadi penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai sekutu itu supaya Soeharto kembali kepada prinsip Pancasila makanya di sana ada bilang menjalankan Pancasila sesuai dengan murni dan konsekuen itu artinya kembali ke konsep Pancasila karena Soeharto sedang melanggar sama dengan PBB sekarang.

Rayhan: Terus kemudian ini Pak Kenapa NU itu membuat Muktamar kemarin di Surabaya itu sebagai agenda prioritas? Sebagai agenda prioritas padahal Fiqih

Peradaban belum memiliki pedoman dan tata laksana baku apa yang menjadi pertimbangan Tanfidhiyah dalam hal ini?

Ahmad Suaedy: Ya jadi konsep dulu baru dibakukan, kalau dibakukan dulu baru pencarian itu artinya bukan pencarian. Jadi itu demokratisnya itu di situ. Jadi, konsep, landasan historisme dikaji dulu tadi saya bilang kan itu merupakan rangkaian dari sebelumnya kan jadi ini dirumuskan dulu baru nanti di di apa namanya? Dibakukan bukan dari baku dulu karena kritik terhadap fiqih yang sudah berlangsung 14 abad itu tidak mudah, inikan mengkritik eksistensi fiqih yang sudah berjalan 14 abad itu yang tadi ideologi ideologi identitas agama tadi itu itu sudah berjalan 14 abad jadi untuk mengubah ini, itu perlu eksplorasi, tapi sebelum itu kan ada rangkaian halaqah di berbagai daerah mungkin ada 500 kali mungkin ya kalau tidak salah itu dua tahap itu dan tidak ada penentangan tentang penghapusan kafir tentang kemanusiaan itu enggak ada penentangan dari Kyai-kyai. Sebenarnya ini sudah ada kesepakatan cuma bagaimana ini menjadi agenda internasional dulu. Misalnya menghapus OKI, itu kan tidak mudah, kita memang tidak ada agenda menghapus OKI, tapi dalam konsep Fiqih Peradaban OKI sebenarnya tidak relevan karena dia berbasiskan pada ideologi identitas agama, jangan lupa ya sedangkan ini Fiqih Peradaban ingin berbasis pada kemanusiaan dan kewarganegaraan. Nah ini kamu bedain nih buat di sini. Jadi tidak mudah, bahkan meskipun negara-negara Islam sekarang yang di bawah PBB tapi di kepala mereka itu masih menggunakan paradigma identitas agama itu di kepalanya. Jadi kalau PBB hilang negara di Timur Tengah itu perang sendiri-sendiri Nah inilah yang Israel tidak mentaati itu, Israel itu justru membangun negara agama. Nah seharusnya PBB lah yang turun tangan jadi enggak bisa misalnya umat Islam turun tangan memerangi orang

Yahudi itu, itu melanggar melanggar hukum internasional. Jadi harus dibawa ke PBB, PBB lah yang mlakukan. Maka NU sebagai umat muslim yang terbesar di dunia mendukung PBB agar menegakkan tugasnya sebenarnya salah satunya menangani Israel. Ini juga mengingatkan orang Islam sendiri yang ingin memerangi Israel secara langsung nggak boleh secara prinsip kemanusiaan dan tadi itu apa, order dunia order itu

Rayhan: Jadi kalau saya konfirmasi saja Pak. Kalau misalkan memang tidak sepakat dengan perlakuan Israel artinya ingin berperang itu atas nama negara. Misalkan Indonesia as Indonesia gitu. Bukan sebagai seorang muslim ya itu saja.

Ahmad Suaedy: Dan bukan organisasi, kemarin PBNU mengundang representasi PLO kan, baca nggak? Di sini barusan kemarin dua hari yang lalu. Ah masa internasional nggak mengikuti. Jadi PBNU itu mengundang representasi dari pemerintahan resmi Palestina kita putarkan ke media dan ini harus baca dong. Aduh Internasional gitu.

Rayhan: Kayaknya saya kemarin ketutup sama berita Golkar Pak.

Ahmad Suaedy: Ya internasional ya harus internasional dong. Itu ada wawancara khusus di Tempo, di INEWS, di TV 1 itu adalah penasehat dari Presiden Nasional Palestina, yaitu namanya Mahmoud Al Habbash. Jadi itu itu kita sedang mendidik masyarakat dan negara-negara Islam agar melihatnya secara ya secara kebangsaan dan secara order dunia kita nggak bisa mendukung Hamas menyerang Israel itu adalah pelanggaran terhadap cara berpikir kita dunia order dan terhadap Islam, Fiqih Peradaban ini melanggar itu. Fiqih Peradaban mengakui sistem dunia, order dunia,

PBB. Jadi kalau ada partai tertentu menyerang negara lain itu pelanggaran, kecuali kalau disepakati PLO yang menyerang itu baru.

Rayhan: Terus bagaimana perannya NU ini dalam Muktamar ya pak? Bukan dalam konsep fiqih peradaban dalam Muktamar Internasional Fiqih Peradaban tadi dan bagaimana NU itu bekerjasama dengan tataran lembaga ulama sedunia dalam fiqih Peradaban?

Ahmad Suaedy: Nah itu yang kadang-kadang salah paham konsep ulama dunia itu adalah konsep identitas agama Itu yang sedang digugat. Maka kita mengundang orang per orang representasi jadi pembicara Jadi misalnya kita mengundang Al Azhar Ya bukan Al Azharnya ya ulamanya itu pribadi punya pandangan apa . Bukan AlAzhar sebagai identitas agama Islam gitu Jadi ya NU sebagai organisasi ulama juga ya representasi dari perkumpulan warga negara bukan Islam. Organisasi keislaman, tapi sebagai pribadi yang punya pandangan. Tentu kita melihat dia sebagai tokoh, cendekiawan itu, tapi bukan representasi. Ini bukan pertemuan para ulama Islam gitu. Maka, jadi harus dipahami apa itu Fiqih peradaban tadi itu ya, sebagai kemanusiaan dan ini hanya perspektifnya Islam gitu jadi ingin mendorong diri dari sini dari ideologi Identitas agama ke kewarganegaraan dan kemanusiaan.

Rayhan: Kalau dalam acara Muktamar nya sendiri, agenda Muktamar nya NU ini berperan sebagai apa

Ahmad Suaedy: Inisiator dan penyelenggara, inisiator itu diselenggarakan oleh NU ini.

Rayhan: Jadi sebagai inisiator penyelenggara ya?

Ahmad Suaedy: Ya itu kan. Peringatan satu abad ya. Satu abad itu ada peralihan konsep tadi

Rayhan: Kalau tokoh yang menginisiasi dari Muktamar nya itu sendiri Pak?

Ahmad Suaedy: Gus Yahya ya sebagai Ketua Umum PBNU

Rayhan: Ini mungkin terakhir Pak Keterkaitannya Muktamar Internasional Fiqih Peradaban sama R20 sendiri itu gimana?

Ahmad Suaedy: Ya R20 itu kan agama-agama Jadi R20 itu sebuah ajakan ini juga diinisiasi oleh Gus Yahya juga oleh PBNU Ingin mengajak agama-agama di dunia untuk merefleksikan diri bahwa problem ketegangan perang di dunia ini adalah andil yang terbesar itu agama andil terbesar memang tidak selalu kelihatan misalnya kayak Israel-Palestina itu kan kelihatannya inter-nation atau antar bangsa. Tapi sebenarnya di bawah kesadaran itu ada agama termasuk Yahudi yang membuat negara Israel menjadi negara Yahudi itu pun masalah Begitu juga Palestina digambarkan sebagai negara Islam padahal Palestina itu negara bangsa. Ada banyak Kristen, ada banyak Yahudi juga ada. Jadi agar para pemuka agama itu melakukan refleksi dan kalau perlu koreksi terhadap agamanya, tafsir ya agama dan NU sudah melakukan, sedang melakukan paling tidak tentang penghapusan kafir dan lain-lain dan ee. Apa kali ini? Yang kedua, selama ini pertemuan-pertemuan agama-agama itu yang bicara itu adalah ahli orang kampus, pengamat, wartawan. Nah ini yang diundang di R20 itu adalah para pemuka agama. Jadi mereka representasi dari agama-agama itu. Kan banyak aliran ya, jadi di dalam Islam itu juga banyak ada Wahabi dan lain-lain. Di dalam Protestan apalagi, Katolik. Jadi kita tidak lagi menghitung Islam Kristen Katolik tapi di dalam Katolik

sendiri ada banyak cabang, di dalam Protestan banyak cabang, di dalam Islam ada, sesuai ada Muhammadiyah dan lain-lain. Jadi perwakilan dari agama-agama itu diundang untuk melakukan refleksi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia sebagai pemuka agama bisa menyampaikan kepada umatnya. Kalau orang kampus kan ya itu sebagai ilmu dibicarain aja gitu. tapi ini sebagai pemuka agama yang punya basis massa

Rayhan: Kalau ide tentang pembaruan, pembaruan fiqih peradaban atau konsep apapun namanya apa ya? Ide pembaruan tentang fiqih siyasah ini tadi, itu pertama kali muncul di zaman

Ahmad Suaedy: Yang apa?

Rayhan: Pembaruan fiqih Siyasah

Ahmad Suaedy: Itu setiap periode terjadi perubahan hanya saja menjawab menjawab tantangan tantangan pada saat itu ya. Misalnya di era Turki Utsmani misalnya, nah munculnya nation state di dunia Islam ya di negara negara mayoritas Islam itu di era runtuhnya apa sih? Turki Utsmani? tau kan? Nah ini dan timbulnya NU juga munculnya NU di eraera itu karena itu ijtihad fiqih siyasa itu mengikuti proses tantangan-tantangan itu, misalnya bagaimana menanggapi penjajahan ya, kolonial kemudian bagaimana menanggapi kemerdekaan, ya itu ada semua kan? Kalau di NU ada Wahid Hasyim yang merepresentasikan NU di dalam siding-sidang BUPKI PPKI. Nah, itu bagian dari proses perubahan Fiqih Siyasah kemudian ketika sistem politik dari apa dari presidensial ke apa namanya parlementer itu juga terjadi perubahan kemudian kembali lagi ke presidensial NU kembali ke Khitoh keluar dari partai politik itu semuanya adalah fiqih siyasah

Rayhan: Oh jadi memang dari NU sendiri fiqih syisahnya ini cenderung sangat dinamis gitu loh ya

Ahmad Suaedy: Iya, dinamis

Rayhan: Dari dulu sudah selalu menyesuaikan

Ahmad Suaedy: Menjawab, bukan menyesuaikan ya. Menjawab tantangannya.

Rayhan: Mungkin itu aja Pak.

Ahmad Suaedy: Iya, oke oke.

Rayhan: Terima kasih Pak ya.

Ahmad Suaedy: Iya, oke.